

**KEBIJAKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH DALAM MENANGGULANGI BENCANA
BANJIR DI KECAMATAN MARO SEBO ILIR
KABUPATEN BATANG HARI.**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



Oleh:

**AKBAR SAFITRAH
NIM: 105180286**

Pembimbing:

Yudi Armansyah, S.Th.I., M.Hum

Muhammad Aiman, S.H.,M.H

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
2023**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**KEBIJAKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH DALAM MENANGGULANGI BENCANA
BANJIR DI KECAMATAN MARO SEBO ILIR
KABUPATEN BATANG HARI.**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



Oleh:

**AKBAR SAFITRAH
NIM: 105180286**

Pembimbing:

Yudi Armansyah, S.Th.I., M.Hum

Muhammad Aiman, S.H.,M.H

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
2023**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akbar Safitrah

NIM : 105180286

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Syariah

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Dalam Menangani Kasus Bencana Banjir Di Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari” adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang di publikasikan atau di tulis orang lain, kecuali kutipan yang telah di sebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang di benarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggung jawabkannya sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Jambi, 01 Januari 2023

Yang menyatakan

Akbar Safitrah

Nim.105180286



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-MuaraBulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi. 36363
Telp/Fax (0741) 583183-584118 website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “ Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Darah Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari” telah diujikan pada Sidang Munaqasah fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 18 Juli 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, Agustus 2023

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Syariah



Panitia Ujian :
Ketua Sidang : Masburyah, S.Ag
NIP. 197201162000032003

Sekretaris Sidang : Awaludin, S.Ag
NIP. 196911202003121002

Pembimbing I : Yudi Armansyah, S.Th.I., M.Hum
NIP. 198606062015031007

Pembimbing II : Muhammad Aiman, S.H, M.H
NIPN. 200016068405

Penguji I : Muhammad Nur, S.Sos, M.y
NIP. 1973042320006041003

Penguji II : Eza Tri Yandy, M.H
NIP. 1999401012020121022

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



MOTTO

لَثِيْرَ عَن وِفْعُوْا اَيُّدِيْكُمْ لِكَسْبِ تَقَبِيْمٍ اَمْحِيْبَةٌ مِّنْ لِّصَلَاتِكُمْ وَمَا

“Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).

(QS. Asy-Syura, 30)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT. Karya tulis ini merupakan wujud upaya kecil yang memberikan harapan untuk mendapatkan rahmat, hidayah dan ridhonya. Skripsi ini saya persembahkan untuk ayahanda tercinta Suhaili dan ibunda tercinta Dian Sanadia dengan rasa penuh hormat, cinta dan do'a restu yang telah membesarkanku dan mendidikku dengan rasa penuh sabar serta selalu memberikan semangat yang tiada henti. Serta adik-adikku Ihsan Nuralim, Lutfia Nabila, M. Azam Alfaqih yang selalu memberikan semangat kepada saya untuk mengejar cita-cita.

Sangat aku sayangi. Tanpa kalian aku bukanlah apa-apa, terimakasih telah membesarkan dengan penuh kasih sayang, terimakasih untuk selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi kepadaku agar tetap kuat menerima segala cobaan yang datang dalam hidup ini. Dan terimakasih untuk do'a yang tiada putusnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobilalamin, puji dan syukur penulis ucapkan keharidhaan kholiqul alam, pemilik jagad raya ALLAH SWT, yng telah memberikan anugerah nikmat, rahmat, hidayah, inayah dan ridhonya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini dengan sebaik- baiknya. Shalawat beriringkan salam hanyalah kepada junjungan kita manusia paling mulia degan segala kesempurnaannya Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ummat kejalan Islam dan ilmu pengetahuan. Penulisan skripsi inibertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu(S1) dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul **“Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari”**.

Dalam rangka proses tersusunnya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari banyak hambatan dan rintangan baik dari segi moril maupun materil karena tidak ada keberhasilan tanpa kesungguhan dan tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan oleh karena itu dalam menyelesaikan skripsi ini pun bantuan dan bimbingan yang diberikan sangatlah menjadi motivasi dan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih sebanyak banyaknya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi, MA., Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thoha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S. Ag MH sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thoha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, M.A,M.I.R,Ph.D sebagai wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Ruslan Abdul Gani, S.H.,M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Ishaq, S.H.,M.Hum, sebagai Wakil Dekan Bidan Kemahasiswaan dan Kerja sama.
4. Ibu Weni Destina, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thoha Saifuddin Jambi
5. Bapak Yudi Armansyah, S.Th.I., M.Hum selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thoha Saifuddin Jambi sekaligus Pembimbing I dan Bapak Muhammad Aiman, S.H., M.H Selaku selaku pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten dosen, dan seluruh karyawan/i Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang terlibat dalam skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung yang telah terlibat banyak membantu sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.

Disamping itu, tentu masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, Kepada Allah SWT kita memohon ampunannya dan kepada manusia kita memohon kemaafannya, Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, 1 Januari 2023



Akbar Safitrah

Nim.105180286

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRAK

Nama : Akbar Safitrah
NIM : 105180286
Judul : Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kecamatan Maro Sebo Iilir Kabupaten Batang Hari

Penelitian ini berjudul “Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kecamatan Maro Sebo Iilir Kabupaten Batang Hari” tujuannya adalah untuk mengetahui Bagaimana Kebijakann Badan Penanggulangan Bencana Dalam Menanggulangi Bencana Banjir, Bagaimana upaya dan tindakan yang diterapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: 1) Kebijakann Badan Penanggulangan Bencana Dalam Menanggulangi Bencana Banjir dari prabencana, sedang terjadi bencana, dan paska bencana telah dilakukan dengan baik, siap siaga, tangap darurat memberi bantuan sedang terjadi bencana. 2) Tindakan yang diterapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu tindakan preventif yang merupakan tindakan yang dilakukan BPBD Kabupaten Batang Hari sebelum terjadinya bencana yakni dengan melakukan pencegahan dan menjauhkan masyarakat dari bahaya bencana. BPBD mempunyai tugas melakukan penanggulangan , dan tugas-tugas penanganan permasalahan sosial lainnya yang terkait dengan penanggulangan bencana dan mempunya fungsi pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana, mendata kerugian material pada korban bencana. untuk di kecamatan maro sebo ilir, kebijakan para anggota BPBD bencana sudah cukup bagus, namun belum optimal, hal ini akan terus diperbaiki oleh BPBD Kabupaten Batang Hari.

Kata Kunci : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemerintah Daerah, Dan Penanggulangan Bencana Banjir.



ABSTRACT

Name : Akbar Safitrah
NIM : 105180286
Title : Policies of the Regional Disaster Management Agency in Overcoming Flood Disasters in Maro Sebo Ilir District, Batang Hari Regency

This research is entitled "Policies of the Regional Disaster Management Agency in Managing Flood Disasters in Maro Sebo Ilir District, Batang Hari Regency" the aim is to find out the policies of the Regional Disaster Management Agency in Managing Flood Disasters, what are the efforts and actions implemented by the Regional Disaster Management Agency. This thesis uses a descriptive qualitative approach with data collection methods through observation, interviews and documentation. Based on the research conducted, the following results and conclusions were obtained: 1) The Policy of the Disaster Management Agency in Handling Flood Disasters from pre-disasters, disasters, and post-disasters has been carried out properly, prepared, emergency responders provide assistance in the event of a disaster. 2) The actions taken by the Regional Disaster Management Agency are preventive actions which are actions taken by the BPBD of Batang Hari Regency before the disaster occurs, namely by taking precautions and keeping the community away from the dangers of disasters. BPBD has the task of carrying out disaster management and handling other social problems related to disaster management and has the function of collecting data and mapping disaster-prone areas, recording material losses to disaster victims. for the Maro Sebo Ilir sub-district, the policies of the disaster BPBD members are quite good, but not optimal, this will continue to be improved by the Batang Hari Regency BPBD.

Keywords: Regional Disaster Management Agency (BPBD), Local Government, And Flood Disaster Management.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	.ii
MOTTOiii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	.viii
DAFTAR ISI.....	.ix
DAFTAR TABEL.....	.xi
DAFTAR GAMBAR.....	.xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Tinjauan Pustaka	16
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	24
H. Jadwal Penelitian.....	25
BAB II KERANGKA TEORI	26
A. Kebijakan Pemerintah	26
B. Konsep Kinerja	27
C. Konsep Organisasi	32
D. Konsep Kinerja Organisasi.....	33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

E. Faktor Faktor Mempengaruhi Kinerja	34
F. Indikator Kinaerja	35
G. Penanggulangan Bencana.....	36

BAB III_GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN..... 40

A. Sejarah Singkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	40
B. Sejarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari.....	45
C. Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	48
D. Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	49
E. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	50
F. Program BPDB	57

BAB IV_HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....63

A. Kebijakan BPBD dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kecamatan Maro Sebo Ilir	63
B. Upaya Dan Tindakan BPBD Dalan Mengurangi Dampak Kerugian Banjir Yang Terjadi Di Kecamatan Maro Sebo Ilir.....	72
C. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari	75

BAB V_PENUTUP.....92

A. Kesimpulan	92
B. Saran	93

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
CURRICULUM VITAE**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian.....	25
Tabel 4.1 Data Bencana Banjir Di Kecamatan Maro Sebo Ilir.....	63
Tabel 4.2 Rekapitulasi Kabupaten Batang Hari Rawan Banjir.....	69



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

DAFTAR GAMBAR

nbar.3.1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	62
nbar.4.1 Dokumentasi Banjir Di Kecamatan Maro Sebo Ilir.....	70



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan pembukaan UUD 1945 pada alinea ke empat yang menyatakan antara lain bahwa “Negara melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum”. Dalam pernyataan ini mempunyai makna, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hak-hak dasar, termasuk perlindungan dan hak untuk bebas dari rasa takut, ancaman, resiko termasuk dampak bencana. Perlindungan atas hak-hak dasar ini menjadikan suatu kewajiban pemerintah untuk mewujudkannya dalam bentuk program-program yang sesuai dengan pernyataan tersebut.

Sejalan dengan tujuan konstitusi yang telah disebutkan di atas, maka suatu keharusan pemerintah untuk melakukan perlindungan dalam hal penanggulangan bencana yang dimuat pada suatu lingkup manajemen bencana (*disaster management*) yang efektif dan efisien, khususnya dalam penanggulangan bencanabanjir. Penanggulangan bencana banjir memang tidak bisa dilakukan oleh sepihak saja yaitu pemerintah, akan tetapi semua pihak harus aktif berperan termasuk masyarakat pun harus berpartisipasi dalam penanganan masalah banjir ini.

Dilihat dari kondisi geografis dan geologis wilayah Indonesia, kepulauan Indonesia terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Letak geografis merupakan

letak suatu daerah atau wilayah dilihat dari letaknya di permukaan bumi. Jika dilihat dari sudut pandang geologi, sebagian wilayah Indonesia merupakan daerah yang rawan terhadap bencana alam. Hal ini disebabkan karena wilayah Indonesia menjadi tempat pertemuan antara dua rangkaian jalur pegunungan muda dunia, yaitu Sirkum Pasifik (Pegunungan lipatan yang dimulai dari pegunungan Atlas di Afrika Utara sampai Nikobar dan masuk Indonesia).¹ Akibatnya Indonesia memiliki bentuk alam yang indah, yaitu mulai dari pegunungan yang berjajar di sisi barat dan selatan pulau-pulau Indonesia, lembah, tebing terjal, ngarai, kepulauan dan sebagainya. Disamping itu Indonesia memiliki bahan mineral tambang yang melimpah akibat dari letak geologis yang dimilikinya.

Pertemuan tiga lempeng tektonik besar, dimana lempeng Indonesia-Australia, Eurasia dan lempeng Pasifik ini yang menyebabkan Indonesia termasuk ke dalam jalur *ring of fire* atau cincin api pasifik dunia, yaitu daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudera Pasifik. Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Sutopo Purwo Nugroho, secara global terjadi peningkatan tren bencana alam sebesar 35% dalam waktu tiga dasawarsa terakhir. Peningkatan ini terutama dalam bencana hidrometeorologi, atau bencana yang dipengaruhi oleh aspek cuaca, seperti banjir, tanah longsor, puting beliung dan kekeringan, bencana

¹ Wardo, Agus T Sunit & Nugroho P, Pantyo, 2002, (*Pengkajian Manajemen Penanggulangan Korban Bencana pada masyarakat di Daerah Rawan Bencana Alam dalam era Otonomi daerah*) Yogyakarta : Departemen Sosial RI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

jenis ini 80% terjadi di Indonesia. Hal ini dikarenakan oleh perubahan lingkungan dan faktor regional, berupa perubahan iklim secara global.²

Akhir-akhir ini Indonesia juga sering terjadi bencana alam yang tidak bisa dielakkan diantaranya gempa bumi, banjir bandang, letusan abu vulkanik gunung simeru dan lain-lain. Bencana alam adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan terjadinya kehancuran dan kerusakan lingkungan yang mana pada akhirnya dapat menyebabkan korban jiwa, dan kerugian harta benda. Bencana alam juga terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam seperti tanah, hutan, penebangan pohon secara liar dan air secara berlebihan serta perubahan cuaca atau iklim global dapat berdampak pada perubahan tata guna air, sehingga mengakibatkan banjir, kekeringan, tanah longsor, dan kebakaran hutan.³

Bencana ini berpengaruh signifikan terhadap pembangunan perekonomian bagi suatu bangsa. Potensi berpengaruh terhadap kehidupan social ekonomi yang telah dialami bagi penduduk masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana seperti Indonesia. Risiko bencana alam ini membawa pengaruh negatif terhadap pembangunan, terutama pembangunan ekonomi. Secara geografis provinsi jambi memiliki potensi terjadinya bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan sebagainya. Hampir seluruh daerah di provinsi jambi ialah daerah rawan bencana. Provinsi jambi

² Farichatun Nisa, 2014, (*Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir, Putting Beliung dan Tanah Longsor Di kabupaten Jombang ISSN*), 2338-445X, Vol 2, No 2, Universitas Airlangga

³ Meilani Safira Indradewa, 2008, (*Potensi dan upaya penanggulangan bencana banjir sungai wolowona, nangaba, dan kaliputih di Kabupaten Ende*), Tesis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta)



terancam banjir tahunan dari sungai-sungai yang ada dikelilingnya terutama sungai batang hari⁴.

Banjir juga terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang terjadi diatas batas normal, perubahan suhu, tanggul/bendungan yang bobol dan terhambatnya aliran air di tempat lain. Di perkotaan genangan lokal terjadi pada saat musim hujan, skala banjir yang terjadi cukup besar dan belum dapat di kendalikan secara dominan. Hal ini membutuhkan strategi-strategi penangan yang menyeluruh dan multi stakeholders. Banjir kilat/dadakan biasanya didefinisikan sebagai banjir yang hanya terjadi dalam waktu kurang dari 5 jam sesudah hujan lebat turun. Biasanya juga dihubungkan dengan banyaknya awan cumulus yang menggumpal di angkasa, kilat atau petir yang keras, badai tropis atau cuaca dingin (seta 1991). Karena banjir ini sangat cepat datangnya, maka peringatan bahaya kepada penduduk sekitar harus segera di berikan informasi dan memulai upaya penyelamatan dan persiapan penanggulangan untuk dampak-dampak yang akan terjadi.

Umumnya banjir dadakan di akibatkan meluapnya air hujan yang sangat deras, bila tanah bantaran sungai rapuh dan tak mampu menahan cukup banyak air maka akan menyebabkan tanah longsor. Penyebab lainnya yaitu kegagalan bendungan/tanggul untuk menahan volume air (debit) yang meningkat, perubahan suhu menyebabkan berubahnya elevasi air laut, dan berbagai perubahan besar lainnya di bagian hulu sungai termasuk perubahan fungsi lahan

⁴ Farichatun Nisa, 2014, (*Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir, Putting Beliung, dan Tanah Longsor di Kabupaten Jombang, ISSN*), 2338-445X, Vol 2, No 2. Universitas Airlangga



(Aryad 1989). Saat ini yang menjadi isu publik yaitu perubahan lahan kepadatan pemukiman penduduk yang menyebabkan tertutupnya lahan, erosi dan sedimentasi yang terjadi diberbagai kawasan perkantoran dan daerah. Kerawan terhadap banjir dadakan akan meningkat bila wilayah itu merupakan lereng curam, sungai dangkal dan penambahan volume air jauh lebih besar dari pada yang tertampung (suripin, 2001).

Luapnya air sungai yang menyebabkan terjadinya banjir dadakan terjadi setelah proses yang cukup lama, meskipun seperti itu banjir yang lolos dari pengamatan masyarakat datangnya dapat terjadi secara dadakan. Selain itu terjadinya banjir dapat terjadi karena luapan sungai yang kebanyakan bersifat musiman atau tahunan dan dapat berlangsung lama selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu yang diterjadi tanpa henti. Penyebabnya bisa dikarenakan hutan gundul, kelongsoran daerah-daerah yang tidak bisa menampung atau menahan kelebihan air, ataupun perubahan suhu/musim, yang terjadi akibat kedua hal itu sekaligus. Banjir terjadi sepanjang aliran sungai dan anak-anak sungai, dimana mampu membanjiri wilayah yang cukup luas bisa terjadi pada satu kecamatan, satu kabupaten dan bahkan lebih dari itu, sehingga banjir yang meluap dari sungai-sungai selain induk sungai bisa disebut banjir kiriman. Besarnya banjir tergantung dari beberapa faktor, diantaranya yaitu kondisi tanah yang kelembapannya tidak tahan , vegetasi, perubahan suhu/musim, keadaan permukaan tanah yang tidak tahan longsor



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

serta rapatnya pemukiman/perumahan warga dan hilangnya kawasan-kawasan yang bisa menyerap air.⁵

Data sejarah banjir karena luapan sungai yang melanda desa-desa yang ada di lembah utama membuktikan bahwa tindakan-tindakan untuk perlindungan tidak bisa diandalkan karena beraneka ragamnya sumber banjir yang tidak hanya dari induk sungai tetapi juga disebabkan oleh anak-anak sungai.⁶ Sebagai contoh banjir sungai yang membawa bencana dari luapan air hujan yang sering terjadi yang menyebabkan semakin parah, air payau membanjiri daratan akibat satu atau perpaduan dampak gelombang pasang antar sungai. Sama seperti banjir luapan sungai, hujan lebat yang jatuh dikawasan geografis luas akan menghasilkan banjir besar di lembah-lembah pesisir yang mendekati muara sungai. Dalam bencana apapun, data sejarah suatu kawasan rawan atau sumber bencana harus selalu ada, dipelajari dan diperbaharui terus-menerus setiap kali ada kejadian baru. Untuk kemudian dijadikan bahan kajian perbandingan dengan peristiwa-peristiwa banjir yang terdahulu dan sebagai bahan dasar informasi atau peringakatan yang akan disampaikan kepada masyarakat yang kawasannya berisiko dilanda banjir.

Banjir merupakan salah satu fenomena alam yang sering menimbulkan kerugian besar dan selalu mengancam jiwa manusia yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Curah hujan yang terus menerus dan adanya pasang naik air sungai akan menyebabkan terjadinya banjir, pernyataan ini tidak sepenuhnya

⁵ Asdak, 2004, (*Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*), UGM Pres Yogyakarta

⁶ Mulyanto, 2007, *Sungai, Fungsi dan Sifat-sifatnya*, Graha Ilmu, Yogyakarta



keliru karena di Indonesia telah terjadi perubahan iklim global yang berdampak pada ketidakaturan musim. Sumatra adalah salah satu daerah rawan bencana, bencana yang sering terjadi diantaranya yaitu banjir, kebakaran hutan, dan gempa bumi yang terkena imbasan dari wilayah lain. Provinsi Jambi dibelah oleh sungai yang bernama sungai Batang Hari dan terdapat beberapa sungai lainnya seperti sungai Batang Merangin, sungai Batang Tembesi, dan sungai Tungkal, oleh karena itu Provinsi Jambi sangat rawan terhadap terjadinya banjir, jika curah hujan tinggi dan sungai meluap.⁷

Meluapnya air sungai Batang Hari bisa juga di akibatkan dengan adanya penebangan pohon secara liar itu di karenakan kurangnya pengawasan dari pemerintahan dan pemerintah kurang tegas dalam menegakkan aturan sehingga penembangan secara liar bisa menimbulkan dampak pada rusaknya lingkungan dan bisa juga mengakibatkan kebanjiran, hal ini disebabkan oleh kelakuan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka para pelaku penebangan hutan secara liar hanya mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan resiko dari ulah mereka tersebut, sehingga apa yang mereka perbuat dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan pasal 50 ayat 3 setiap orang dilarang, mengerjakan, menggunakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah, merambah kawasan hutan, menebang pohon dalam kawasan hutan. Hutan sebagai penunjang kehidupan

⁷ Nahrul Fhadila, 2020, *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Jambi*, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi



ekonomi nasional perlu diperhatikan dan diolah sesuai dengan kepentingan Negara, dan dilarang mengadakan penebangan hutan secara liar. Sesuai dengan peraturan Provinsi Riau Nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan lingkungan hutan dan penataan hukum lingkungan hidup Provinsi Riau meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum⁸. Dengan demikian sehingga masyarakat patuh akan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah sehingga tidak melakukan penebangan hutan dengan demikian tidak adanya dampak yang ditimbulkan akan tetapi di dalam perkembangannya, kelemahan dan kelalaian pemerintah, sehingga adanya tuntutan-tuntutan dari masyarakat yang ingin berusaha dalam mengelolah hutan secara ilegal, tanpa adanya surat izin yang sah dari dinas kehutanan. Sedangkan pemerintah yang seharusnya tugasnya ditekan kepada pengontrolan, pembinaan, pengaturan, dan bimbingan.

Kabupaten Batang Hari merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jambi. Kabupaten Batang Hari memiliki beberapa kawasan pemukiman penduduk yang rawan terjadi banjir saat musim hujan terjadi, Pemukiman penduduk yang rawan terjadi banjir sebagian besar ada di wilayah Kecamatan Maro Sebo Ilir. Kecamatan Maro Sebo Ilir merupakan lokasi atau daerah yang sering terkena banjir diantaranya kawasan Desa Danau Embat dan Desa Terusan, yang mana Desa tersebut juga merupakan kawasan dataran rendah yang hampir setiap musim hujan panjang akan meningkatnya luapan air

⁸ Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Riau



sungai sehingga terjadi banjir. Tidak hanya itu banjir juga sering terjadi dengan adanya limpahan banjir dari bagian hulu Kabupaten Batang Hari, seperti limpahan dari daerah Kabupaten Bungo, Tebo, Batang Hari, dan Kabupaten Merangin.

Luas kawasan Desa Danau Embat yaitu sekitar 31.560 hektar ini berbatasan dengan Desa Kehidupan Baru dan Desa Tidar Kuranji di sebelah utara. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pasar Terusan (Kec. Muara Bulian), disebelah Barat berbatasan dengan Desa Rantau Kapas Tuo (Kec. Muara Tembesi), dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Terusan. Desa ini dikelilingi oleh tanaman sawit, hutan belantara, perkebunan sayuran dan lain-lainnya.

Ditahun 2021 ini banjir yang melanda Kabupaten Batanghari khususnya di Kecamatan Maro Sebo Ilir sudah terjadi 2 kali, beruntungnya banjir tidak terlalu tinggi hanya mengenai jalanan dan sedikit rumah warga yang terkena banjir, walau demikian tetap aktifitas masyarakat terganggu karena sulit melalui jalanan yang tergenang air, dipenghujung tahun 2021 ini juga aliran air terlihat semakin naik, yang disebabkan oleh curah hujan yang terus menerus turun.

Salah satu kerugian besar akibat bencana banjir yaitu dari segi ekonomi, yang mana warga setempat pekerjaannya sebagian besar sebagai petani sawit, padi dan berkebun sayuran. Banjir tidak hanya menyebabkan sawah dan sayuran tergenang, sehingga tidak dapat di panen atau bahkan warga mengalami



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

gagal panen, banjir pun juga mengakibatkan akses jalan terputus sehingga warga tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan sulit untuk pergi bekerja, tidak hanya itu sekolahpun ikut terendam banjir yang mengakibatkan terhentinya proses belajar mengajar. Jika banjir ini sudah sangat dalam dan tinggi maka kerugian yang dialami tidak hanya yang tertera tersebut, kerugian materi pun bisa mencapai miliaran rupiah, akan tetapi yang perlu diwaspadai dan diantisipasi adalah penyakit yang akan timbul pasca banjir. Karena itu perlunya persediaan obat-obatan.

Dalam mengatasi masalah banjir yang sering terjadi di Kecamatan Maro Sebo Ilir, belum ada upaya pemerintah secara serius dalam penanggulangan bencana banjir, karena hingga saat ini upaya penanggulangan belum menyentuh akar persoalan seperti, dengan cara mengatasi kerusakan hutan, erosi dan pendangkalan (sedimental) sungai, penanggulangan bencana banjir saat ini hanya bersifat darurat dimana pemerintah setempat baru bergerak melakukan penanggulangan banjir ketika sudah terjadi banjir, dimana hanya memberikan bantuan berupa beras, makanan siap saji, ikan kaleng, telur, minyak goreng, susu kaleng dan lainnya.

Badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Batang Hari lahir sebagai bentuk proaktif pemerintah Kabupaten Batang Hari terhadap perubahan paradigma penanggulangan bencana dan kebijakan yang telah ditetapkan, yaitu meninggalkan pola lama yang berfokus pada tanggap darurat menjadi upaya pemecahan persoalan dari sumber masalahnya serta membuat penanggulangan bencana menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program pembangunan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pemerintah, mengingat sebagian wilayah Kabupaten Batang Hari merupakan wilayah rawan banjir.⁹ Berdasarkan hal diatas dapat diketahui bahwa peran kedua institusi sangat penting dalam penanggulangan bencana alam khususnya soal penanggulangan bencana banjir.

Pada kenyataannya upaya pencegahan dan penanggulangan bencana banjir oleh sebagian besar masyarakat belum dirasakan sebagai satu kebutuhan atau hal yang mendesak, karena masyarakat belum menyadari bahwa bencana dapat terjadi kapan saja, dimana saja, dan dapat menimpa siapa saja. Pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab yang kurang akan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan bencana, akan berdampak pada jatuhnya korban dan kerugian material, serta sulitnya masyarakat untuk pergi bekerja.¹⁰ Perilaku masyarakat dalam penanganan sampah juga sangat berperan aktif dalam proses drainase yang buruk di Kecamatan Maro Sebo Ilir, hal ini terjadi akibat seringnya masyarakat membuang sampah ke sungai Batang Hari dan tidak membakar sampahnya.

Penanggulangan bencana adalah segala upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, rehabilitasi, rekontruksi dan tanggap darurat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Hal ini berarti bahwa komunitas dalam penanggulangan bencana didalam masyarakat memerlukan perhatian khusus dari pemerintah ketika terjadi

⁹ Rina, Marina, 2013, Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Sungai Mandau, Riau, Bina Widya

¹⁰ Nahrul Fhadila, 2020, *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Jambi*, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi



bencana setiap kelompok masyarakat mempunyai kemampuan dan cara untuk menghadapi lingkungan demi kelangsungan hidupnya.

Tujuan dari penanggulangan bencana adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari acaman bencana, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terlaksananya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik dan swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, kedermawanan dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi dan mensejahterakan setiap warga yang berada di wilayah kerjanya secara demokratis. (1) Ada semangat untuk pengembangan potensi sumber daya daerah yang terkait dengan upaya penanggulangan bencana daerah. (2) Merupakan amanat untuk mengimplementasikan kegiatan Pengurangan Resiko Bencana hingga ke pemerintah daerah. (3) Merupakan kewajiban meningkatkan kinerja pemerintah Daerah dalam memberikan pelayan publik sesuai standar pelayanan minimal. (4) Merupakan amanat dari Undang-Undang untuk memastikan penyelenggaraan penanggulang bencana dimasukkan ke dalam program pembangunan daerah termasuk pengalokasian dana. (5) Merupakan kewajiban Pemerintah Daerah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kerangka kerja penanggulangan bencana yang diselenggarakan olehnya. (6) Bahwa penyelenggaraan penanggulang bencana merupakan perlindungan terhadap kehidupan serta penghidupan yang merupakan tanggungjawab



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. (7) Bahwa untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana secara cepat, tanggap, sistematis, terpadu dan terkoordinasi diperlukan suatu lembaga yang secara khusus melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana.

Adapun Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: (1) Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. (2) Penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah. (3) Perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana. (4) Pembentukan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana. (5) Penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain. (6) Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional. (7) Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan.

Berdasarkan ketentuan diatas, untuk menanggulangi masalah banjir di Kabupaten Batang hari, maka dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Batang hari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang hari Nomor 13 Tahun 2011 tentang pembentukan, organisasi, dan tata kerja BPBD. Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Batang Hari ini sebagai salah satu Badan yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah



Kabupaten Batang Hari.

Dibuatnya Peraturan Daerah mengenai pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini, karena beberapa wilayah daerah di Kabupaten Batang Hari rentan akan beberapa macam bencana. Yang diantaranya adalah bencana banjir, kekeringan, dan kebakaran.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam merumuskan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas yang bersifat spesifik dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada tahap pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang meliputi penetapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, peta rawan bencana, prosedur tetap, komando saat darurat, pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang serta barang untuk korban bencana serta melaksanakan ketatausahaan.

Kegiatan observasi terdapat misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari yang belum diterapkan yaitu meningkatkan pemahaman dan perlindungan masyarakat dari ancaman bencana, membangun sistem penanggulangan bencana yang handal dan dari segi dimensinya ada kekurangan dalam dimensi responsivitas yaitu kesadaran masyarakatnya akan bahaya bencana masih kurang. Melihat pemaparan ini, maka peneliti tertarik mengangkat judul **“Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kecamatan Maro Sebo Ilir**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Kabupaten Batang Hari”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan BPBD dalam menanggulangi bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Maro Sebo Iilir?
2. Bagaimana upaya dan tindakan BPBD dalam mengurangi dampak kerugian banjir yang terjadi di Kecamatan Maro Sebo Iilir?
3. Bagaimana Peran BPBD dalam penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Maro Sebo Iilir?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan BPBD dalam menanggulangi bencana banjir di Kecamatan Maro sebo ilir.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya dan tindakan BPBD dalam mengurangi dampak kerugian yang terjadi di Kecamatan Maro sebo ilir.
3. Untuk mengetahui peran BPBD dalam penangglangan bencana banjir di Kecamatan Maro Sebo Iilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut :

- a) Secara teoritis, kegunaan penelitian ini untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan serta kemampuan berfikir secara ilmiah.
- b) Secara praktis, penelitian ini diharapkan untuk memberikan gambaran terhadap masyarakat lainnya mengenai kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari dalam menangani bencana banjir.

D. Kerangka Teori

Penelitian ini diperlukan landasan berfikir, agar pada bagian ini dapat di kemukakan berbagai teori dari beberapa tokoh ahli untuk mengkaji masalah yang ada di lapangan.

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pembahasan ataupun studi yang membahas tentang kinerja BPBD dalam penanggulangan bencana banjir telah ditemukan buku-buku dan skripsi yang membahas tentang kinerja BPBD dalam penanggulangan bencana banjir, misalnya:

Penelitian pertama yang ditemukan adalah Skripsi Anwar Musyadad Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2015 Dengan Judul **“Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Lebak” Penelitian ini mengkaji kinerja badan penanggulangan bencana daerah dalam bencana banjir di kabupaten lebak dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif.¹¹

Penelitian Kedua, Yang Dilakukan Oleh Henrika Riantika Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021 Dengan Judul **“Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kecamatan Maro Sebo IlirKecamatan Batang Hari Kabupaten Batang Hari”** Penelitian ini mengkaji peran badan penanggulangan bencana daerah dalam bencana banjir di kabupaten lebak dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.¹²

Penelitian Ketiga, Yang Dilakukan Oleh Nurmalan Harahap Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Tahun 2020 Dengan Judul **“Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Pekanbaru”** Penelitian ini mengkaji peran badan penanggulangan bencana daerah dalam bencana banjir di kota pekanbaru dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.¹³

Dari ketiga penelitian diatas yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis adalah dari segi pembahasan, pada penelitian sebelumnya membahas

¹¹ Anwar Musyadad, 2015. *“Kinerja badan penanggulangan bencana daerah dalam bencana banjir di kabupaten lebak”* (Universitas Sulthan Ageng)

¹² Henrika, 2021 *“peran badan penangulangan bencana daerah dalam penanggulangan bencana banjir di kelurah lewaja”*(Universitas Muhamdiyah Makasar)

¹³ Nurmal Harahap, 2020. *“ Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Pekanbaru”* (Universitas Islam Riau)

hal-hal yang ditulis oleh peneliti. Penelitian pertama membahas tentang Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Lebak. Peneliti kedua, membahas tentang Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kecamatan Maro Sebo Ilir Kecamatan Batang Hari . Peneliti ketiga, Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Pekanbaru.

Dari penjelasan diatas banyak hal yang menjadi perbedaan, pada pembahasan ini peneliti fokus pada Kebijakan Pemerintah kabupaten batang hari dalam menangani kasus bencana alam banjir Di Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya untuk tempat penelitian juga berbeda, peneliti meneliti pada pemerintahan kabupaten batang hari dan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Di Desa Danau Embat Kecamatan Maro Sebo Ilir.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses penelitian atau pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Maka dalam penulisan ini penulis menggunakan metodologi sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian terbagi menjadi dua macam, yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*) dan jenis penelitian pustaka (*library research*).





- a. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi. Penelitian ini digunakan peneliti untuk menggali informasi yang ada lokasi penelitian.
- b. Penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber pustaka, baik dengan menggunakan buku, jurnal, ataupun data-data terdahulu.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan, karena penulis harus langsung melihat lokasi penelitian agar dapat mendapatkan hasil dari yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana dilakukannya penelitian. Dengan ditetapkannya lokasi dalam penelitian maka, akan dapat lebih mudah untuk mengetahui tempat dilakukannya suatu penelitian. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah desa yang berlokasi di Kabupaten Batang Hari, Kecamatan Maro Sebo Ilir, Desa Danau Embat.

3. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini meliputi pihak yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai latar belakang dan keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian sehingga data yang dihasilkan akurat. Informan dalam penelitian terdiri dari Kepala BPDB Sebagai informant kunci, dan Dinas Sosiasal, camat, Desa, dan Masyarakat sebagai informant tambahan. Penentuan subjek penelitian tersebut menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu berdasarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



pertimbangan bahwa subjek dianggap memiliki pengetahuan terkait informasi yang dibutuhkan.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini adalah memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Metode ini menggambarkan suatu data seperti menganalisis kejadian, fenomena, ataupun keadaan sosial.

5. Jenis dan Sumber Data

a) Jenis Data

Dalam upaya merumuskan skripsi ini, penulis melakukan penelitian lapangan, maka sumber data ataupun informasi yang menjadi data baku peneliti untuk diolah merupakan data yang berbentuk data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer merupakan data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya maupun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Data primer dari penelitian ini adalah informasi yang berasal dari dokumen yang didapat langsung di BPBD Kabupaten Batang Hari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang didapat langsung di lapangan dan hasil dari berbagai literature. Data sekunder dari penelitian ini adalah data yang didapatkan dari literature-literatur yang mendukung penelitian barik berupa koran, buku, artikel, dan lain-lain yang di anaggap penting dalam mendukung penelitian ini.

b) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

1) Data Primer

Merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya, seperti wawancara, observasi atau laporan yang sifatnya tidak resmi dan kemudian akan diolah oleh peneliti.

2) Data Sekunder

Merupakan data yang di dapatkan melalui dokumen-dokumen yang resmi seperti laporan, skripsi terdahulu, undang-undang maupun peraturan pemerintah.¹⁴

6. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁴ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*.(Remaja Rosdakarya;2014) hlmn 106



a. Observasi

Observasi adalah tata cara pengumpulan data maupun partisipan yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala atau objek yang akan di amati. Observasi dilakukan agar memberikan kemudahan dan membantu peneliti dalam memperoleh data. Observasi ini dilakukan dengan dua indra yaitu indra penglihatan dan indra pendengaran. Dalam melakukan observasi hal yang paling penting yaitu pengamatan dan ingatan yang kuat.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi yang berupa tanya jawab secara langsung kepada narasumber.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode atau atata cara mengumpulkan data atau informasi berbentuk dokumen-dokumen.

Metode dokumentasi merupakan tata cara ataupun metode pengumpulan informasi dari berbagai dokumen yang bersifat resmi dan diakui sebagai memo, buku, surat kabar, dan sebagainya.¹⁵

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain.

¹⁵ Husaini Usman, Purnomo. *Metode Penelitian Sosial*. (PT Bumi Aksara:2008). Hlmn 54

Analisis data dalam penelitian secara teknis dilaksanakan secara induktif yaitu analisa yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mengumpulkan data yang diperoleh di lapangan tempat terjadinya penelitian baik berupa catatan, dokumen, foto, dan dokumentasi lainnya. Kemudian diperiksa dan diurutkan.

b. Reduksi Data

Data yang diperoleh dilapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci, dalam hal ini reduksi data dapat didefinisikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data kasar yang diperoleh dari data lapangan.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan penyusunan sekumpulan informasi dari reduksi data yang kemudian disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah dipahami.

d. Verifikasi Data

Dari data-data yang diperoleh dari hasil wawancara. Study Literature kemudian peneliti mencari makna dari hasil penelitian atau hasil yang terkumpul.¹⁶

¹⁶ Dewi. *Skripsi Efektivitas Pelayanan Publik*. (Universitas Hasanuddin: 2017)



H. Sistematika Penulisan

Agar penulis skripsi tidak keluar dari pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan yang akan menjadi panduan dalam penulisan skripsi ini dan menjadi ringkasan dalam pembahasan-pembahasan yang ada didalam bab nys sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Pada hakikatnya bab ini menjadi pijakan bagi penulis skripsi. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan tinjauan pustaka.

Bab II : Merupakan bab yang membahas mengenai metode penelitian yang didalamnya membahas tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, instrument pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika penulisan.

Bab III : Merupakan bab yang membuat gambaran umum lokasi.

Bab IV : Berisi tentang pembahasan yang akan menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, tentang Efektivitas Pelayanan Samsat Keliling.

Bab V : Berisi tentang penutupan yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran dan curriculum vitae. Kesimpulan ditarik dari pembahasan dan uraian yang telah ditulis dan berkaitan erat dengan pokok masalah. Kesimpulan bukan resume dari apa yang telah ditulis dahulu melainkan kesimpulan adalah jawaban masalah dari data yang diperoleh.



I. Jadwal Penelitian

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian dilapangan, maka penulis menyusun agenda secara sistematis yang terlihat pada tabel jadwal penelitian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Tahun 2022-2023																				
		Maret				April				Oktober				Januari				Februari				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Pengajuan Judul	x																				
2.	Pembuatan Proposal							x														
3.	Perbaikan Proposal dan Seminar																		x			

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



BAB II

KERANGKA TEORI

Kerangka teori merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori dalam menjawab pertanyaan penelitian. Agar penelitian ini lebih terarah dan tepat sasaran, maka penulis menganggap perlu menggunakan kerangka teori sebagai landasan berfikir guna mendapatkan konsep yang benar dan tepat dalam penyusunan skripsi. Serta peneliti lebih dahulu menjelaskan sebuah kerangka konseptual agar bisa lebih memahaminya.

A. Kebijakan Pemerintahan

Kebijakan pemerintahan adalah pemerintah (Public) itu merupakan pengambilan keputusan (decision making) dan pengambilan kebijakan (policy making), yaitu memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah.¹⁷

1. Kebijakan

Kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau sekelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu.¹⁸ kebijakan publik dikatakan sebagai apa yang tidak dilakukan maupun apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pokok kajian dari hal ini adalah Negara.

Pengertian ini selanjutnya dikembangkan dan diperbaharui oleh para ilmuan yang berkecimpung dalam ilmu kebijakan publik. Defenisi

¹⁷ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan & Al-Qur'an*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara 2004). Hlm.33.

¹⁸ Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008),Hlm 20

kebijakan publik menurut Thomas R. Dye ini dapat diklasifikasikan sebagai keputusan (decision), dimana pemerintah mempunyai wewenang untuk menggunakan keputusan otoritatif, termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi, demi teratasi suatu persoalan publik.¹⁹

2. Pemerintahan

Istilah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu Negara, seperti kabinet merupakan suatu pemerintah. Istilah pemerintah diartikan dengan perbuatan seperti cara, hal urusan dan sebagainya.

Memerintah secara etimologis dapat diartikan sebagai tindakan yang terus menerus atau kebijakan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki.²⁰

B. Konsep Kinerja

Menurut kamus besar bahasa indonesia, secara etimologis kinerja diartikan sebagai sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan. Kinerja dalam pengertiannya diartikan sebagai prestasi yang diperlihatkan dalam kegiatan atau pekerjaan yang telah dilakukan. Sedangkan Lijan Poltak Sinambela mengemukakan bahwa kinerja merupakan implementasi dari teori keseimbangan, yang mengatakan bahwa seseorang akan menunjukkan prestasi

¹⁹ Budi Wiranto, *Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus)* (Yogyakarta: Caps,2012) Hlm 20.

²⁰ Inu Kencana Syafe'i, *Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: Mandar Maju,2007)Hlm.31



yang optimal bila ia mendapatkan manfaat (*benefit*) dan terdapat adanya rangsangan (*inducement*) dalam pekerjaannya secara adil dan masuk akal (*reasonable*).²¹

Sementara itu, Mangkunegara mengemukakan kinerja (prestasi kerja) ialah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Kinerja merupakan keluaran yang dihasilkan secara kualitas dan kuantitas. Pencapaian tersebut dihasilkan dari pegawai yang bertanggungjawab dengan pekerjaannya.²²

Menurut Keban menyebutkan bahwa kinerja (*performance*) dalam organisasi didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil (*the degree of accomplishment*) atau kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi secara berkesinambungan.²³

Selanjutnya, mengemukakan bahwa kinerja organisasi adalah tingkat yang menunjukkan seberapa jauh pelaksanaan tugas dapat dijalankan secara aktual dan misi organisasi tercapai.²⁴ Sedangkan, Mahsun berpendapat bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.²⁵

²¹ Sinambela, Lijan Poltak dkk. 2014. *Reformasi Pelayanan Public Teori Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara

²² Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu 2006. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Refika Aditama

²³ Keban, Jeremias T. 2003. *Indikator Kinerja Pemerintah Daerah: Pendekatan Manajemen dan Kebijakan, Makalah Seminar Sehari*. Yogyakarta: FISIPOL UGM

²⁴ Steers, R.M. 2003. *Organization Effectiveness A Behavioral View*. Jakarta: Erlangga

²⁵ Mahsun, Muhammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: FE UGM



Sedarmayanti dalam bukunya mengenai pengembangan kepribadian pegawai dikatakan bahwa kinerja: Hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum dan sesuai moral maupun etika.²⁶

Moeheriono (mengemukakan bahwa kinerja (*performance*) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.²⁷

Sementara itu, Robbins yang dikutip oleh Moeheriono (mengemukakan bahwa kinerja sebagai fungsi interaksi antara kemampuan (*ability*), motivasi (*motivation*), dan kesempatan (*opportunity*). Artinya kinerja merupakan fungsi dari kemampuan, motivasi, dan kesempatan. Seiring dengan hal itu, menurut Moeheriono mengemukakan bahwa kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berhubungan dengan kepuasan kerja pegawai/karyawan dan tingkat besaran imbalan yang diberikan, serta dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan, dan sifat-sifat individu.²⁸

Oleh karenanya, menurut model mitra-*lawyer*, kinerja individu pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor; (1) harapan mengenai imbalan, (2) dorongan, (3) kemampuan, (4) kebutuhan dan sifat, (5)

²⁶ Sedarmayanti. 2004. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Jakarta:CV. Mandar maju

²⁷ Moeheriono. 2010. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Bogor: Ghalia Indonesia

²⁸ Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN



persepsi terhadap tugas, (6) imbalan eksternal dan internal, serta (7) persepsi terhadap tingkat imbalan dan kepuasan kerja.

Sumber lain mengemukakan seperti yang dinyatakan oleh Otley yang dikutip oleh Mahmudi menyatakan bahwa kinerja mengacu pada sesuatu yang terkait dengan kegiatan melakukan pekerjaan, dalam hal ini meliputi hasil yang dicapai kerja tersebut. Sejalan dengan pendapat Rogers yang dikutip oleh Mahmudi yang mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja itu sendiri (*outcomes of works*), karena hasil kerja memberikan keterkaitan yang kuat terhadap tujuan-tujuan strategik organisasi, kepuasan pelanggan , dan kontribusi ekonomi.

Mahmudi berpendapat bahwa kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya, diantaranya yaitu:

1. Faktor personal/individu, meliputi: pengetahuan, keterampilan (*skill*), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu;
2. Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan *team leader*;
3. Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim;
4. Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur



yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi;

5. Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Wibowo (berpendapat bahwa kinerja adalah merupakan implementasi dari rencana yang telah disusun. Implementasi kinerja dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi, dan kepentingan. Bagaimana organisasi menghargai dan memperlakukan sumber daya manusianya akan mempengaruhi sikap dan prilakunya dalam menjalankan kinerja.²⁹

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Hersey dan Blanchard, bahwa kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Seseorang harus memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya.

Lain hal menurut Prawirosentono kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

²⁹ Wibowo. 2011. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada



Dari berbagai pendapat yang telah diuraikan di atas, bahwa definisi dari kinerja (*performance*) dapat disimpulkan sebagai hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, sesuai dengan kewenangan dan tugas tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

C. Konsep Organisasi

Organisasi dalam bahasa Inggris yaitu *organize* yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungan satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhan. Sedangkan, Hasibuan mengemukakan bahwa organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu, organisasi hanya merupakan alat dan wadah.³⁰

Mahsun memberikan pendapat tentang konsep organisasi, bahwa organisasi sering dipahami sebagai sekelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama.³¹

Sementara itu, Robbins mengemukakan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang

³⁰ Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara

³¹ Mahsun, Muhammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* Yogyakarta: FE UGM



relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai tujuan.³²

D. Konsep Kinerja Organisasi

Simanjuntak mengemukakan bahwa kinerja organisasi merupakan agregasi atau akumulasi kinerja semua unit-unit organisasi, yang samadengan penjumlahan kinerja semua orang atau individu yang bekerja di organisasi tersebut. Dengan demikian kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu dukungan organisasi, kemampuan manajemen, dan kinerja setiap orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Kinerja organisasi juga sangat dipengaruhi oleh dukungan organisasi antara lain dalam penyusunan struktur organisasi, pemilihan teknologi, dan penyediaan prasarana serta sarana kerja.³³

Sementara itu, surjadi berpendapat bahwa kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi, tercapainya tujuan organisasi berarti bahwa kinerja organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.³⁴ Sedangkan menurut Sobandi kinerja organisasi merupakan sesuatu yang telah dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan *input*, *output*, *outcome*, *benefit* maupun

³² Robbins, Stephan P. 2001. *Prilaku Organisasi*. Jakarta: Prehalindo

³³ Simanjuntak, Payaman J.2005. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: CV. Mandar

³⁴ Sujardi. 2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: Refika Aditama





impact.³⁵

E. Faktor-Faktor Mempengaruhi Kinerja

Kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. Mahmudi (mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah:

- 1) Faktor personal/individu, meliputi: pengetahuan, keterampilan (*skill*), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu;
- 2) Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan *team leader*;
- 3) Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim;
- 4) Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastrukturnya yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi;
- 5) Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.³⁶

Sedangkan menurut Mangkunegara (faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah sebagai berikut:

³⁵ Soebandi, Baban. 2006. *Desentralisasi dan Tuntunan Penataan Kelembagaan daerah*. Bandung: Humaniora

³⁶ *Ibid.*, hlm



- 1) Faktor Kemampuan Secara umum kemampuan ini terbagi menjadi dua yaitu: kemampuan potensi (*IQ*) dan kemampuan realiti (*knowledge and skills*).
- 2) Faktor Motivasi
Motivasi terbentuk dari sikap seorang pekerja yang dalam menghadapi situasi kerja.³⁷

F. Indikator Kinerja

Menurut Moheriono indikator kinerja (*performance indicator*) didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Indikator kinerja sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang dipergunakan untuk mengukur output atau outcome suatu kegiatan.
- 2) Sebagai alat ukur yang dipergunakan untuk menentukan derajat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.
- 3) Sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.
- 4) Suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas.³⁸

Hal lain, berpendapat bahwa indikator kinerja merupakan sarana atau alat (*means*) untuk mengukur hasil suatu aktivitas, kegiatan, atau proses, dan bukan hasil atau tujuan itu sendiri (*ends*). Peran indikator kinerja bagi organisasi

³⁷ *Ibid.*, hlm 67

³⁸ Moheriono.2010. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Bogor. Ghalia. Indonesia

sektor publik adalah memberikan tanda ataurambu-rambu bagi manajer dan pihak luar untuk menilai kinerja organisasi.

G. Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana merupakan upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, serta kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekontruksi. Kegiatan pencegahan bencana yang dimaksud adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi ancaman bencana, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 74 Tahun 2017 tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja BPBD Kabupaten Batang Hari. Yang memiliki tugas menetapkan pedoman dan pengaruh 18 terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekontruksi secara adil dan setara. Menetapkan kebutuhan penyelenggara PB berdasarkan peraturan perundang-undangan. Serta memiliki fungsi perumusan dan penetapan kebijakan PB dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien.

1. Penanggulangan Bencana

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, penanggulangan bencana memiliki tujuan yaitu:

- a. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
- b. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.
- c. Mendorong semangat gotong royong, kesetia kawan dan



kedermawanan.

d. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

e. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

f. Menghargai budaya local, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta.

2. Bencana

Menurut Asian Disaster Reduction Center yang dikutip Wijayanto Bencana merupakan suatu gangguan serius yang 19 dirasakan baik oleh masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas terhadap berbagai material dan lingkungan (alam) dimana dampak yang terjadi melebihi kemampuan manusia dalam mengatasinya dengan sumber daya yang ada.³⁹

Menurut Parker yang dikutip Dian Wijayanto dalam bukunya “pengantar manajemen” bencana adalah sebuah kejadian yang tidak biasa terjadi diakibatkan oleh alam maupun ulah manusia, salah satunya merupakan imbas dari kesalahan teknologi yang memicu respon dari masyarakat, komunitas, individu serta lingkungan untuk memberikan antusiasme yang bersifat luas.

Sedangkan Haryanto Mengemukakan : Bencana adalah Terjadinya kerusakan pada pola kehidupan normal, yang bersifat merugikan kehidupan manusia, struktur sosial serta munculnya kebutuhan masyarakat. Adapun

³⁹ Wijayanto, D. (2012). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.





jenis bencana sebagai berikut:

- a. Bencana Alam Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh alam seperti gempa bumi, banjir, tsunami, kekeringan, gunung meletus, longsor dan angin topan.
- b. Bencana non-Alam Bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam seperti diantaranya berupa epidemi, gagal teknologi, gagal modernisasi, serta wabah penyakit.
- c. Bencana Sosial Bencana yang diakibatkan oleh manusia seperti konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat.⁴⁰

3. Banjir

Banjir dapat diartikan sebagai tergenangnya suatu tempat akibat meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air disuatu wilayah dan menimbulkan kerugian ekonomi, sosial dan fisik. Banjir adalah ancaman musiman yang terjadi ketika meluapnya tubuh air dari saluran yang ada sehingga menggenangi wilayah sekitarnya.⁴¹

Banjir merupakan peristiwa dimana daratan yang biasanya kering menjadi tergenang air, hal ini disebabkan karena curah hujan yang cenderung tinggi dan kondisi topografi wilayah berupa dataran rendah hingga cekung. Selain itu, terjadinya banjir juga dapat disebabkan oleh limpasan air permukaan yang meluap sehingga volumenya melebihi kapasitas pengaliran sistem drainase atau sistem aliran sungai. Adapun

⁴⁰ Haryanto, Sri, H. (2001). *Manajemen Penanggulangan Bencana*. Jakarta: Profil Manggalla Agni.

⁴¹ Rahau, H & Dkk. (2009). *Banjir dan Penanggulangannya*. Jakarta: PromisIndonesia.

penyebab tanah tidak mampu lagi menyerap air karena rendahnya kemampuan infiltrasi tanah sehingga terjadinya bencana banjir. Banjir juga dapat terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang di atas normal, tanggul/bendungan yang bobol, perubahan suhu, terhambatnya aliran air di tempat lain.⁴²

Faktor penyebab terjadinya bencana banjir dapat diklarifikasikan dalam dua kategori, yang pertama banjir alami, kedua banjir tindakan manusia. Banjir alami diakibatkan oleh curah hujan, erosi, fisiografi dan sedimentasi. Sedangkan 21 banjir akibat manusia disebabkan karena aktifitas atau ulah manusia yang menyebabkan perubahan terhadap lingkungan seperti perubahan pada kondisi daerah aliran sungai (DAS).⁴³



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

⁴² Ligal, S. (2008). *Pendekatan Pencegahan Dan Penanggulangan Banjir*. *Jurnal Dinamika Teknik Sipil*.

⁴³ Kodoatie. J. Dan Sugiyanto. Ri, (2002). *Banjir*. Yogyakarta: PustakaBelajar.

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah lembaga pemerintah non departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.⁴⁴ Dalam merespon sistem penanggulangan bencana pemerintah Indonesia sangat serius membangun legalisasi, lembaga, maupun budgeting. Setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.⁴⁵

BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan presiden nomor 8 tahun 2008, menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satkoralak) di tingkat provinsi dan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) di tingkat kabupaten/ kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005.

BPBD terbentuk tidak terlepas dari perkembangan penanggulangan bencana pada masa kemerdekaan, sementara itu, perkembangan tersebut sangat dipengaruhi pada konteks situasi, cakupan dan paradigma penanggulangan bencana. Melihat kenyataan saat ini, berbagai bencana yang dilatarbelakangi kondisi geografis, geologis, hidrogis dan demografis mendorong Indonesia

⁴⁴ https://id.m.wikipedia.org/wiki/badan_penanggulangan_bencana_daerah. Diakses tanggal 1 Desember

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

untuk membangun visi untuk membangun ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana.

Wilayah Indonesia merupakan gugusan kepulauan terbesar di dunia. Wilayah yang juga terletak di antara benua Asia dan Australia dan lautan Hindia dan Pasifik ini memiliki 17.508 pulau. Meskipun tersimpan kekayaan alam dan keindahan pulau-pulau yang luar biasa, bangsa Indonesia perlu menyadari bahwa wilayah nusantara ini memiliki 129 gunung merapi aktif, atau dikenal dengan ring of fire, serta terletak berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif dunia, lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik.

Ring of fire dan berada di pertemuan tiga lempeng tektonik menempatkan Negara kepulauan ini berpotensi terhadap ancaman bencana alam. Di sisi lain, posisi Indonesia yang berada di wilayah tropis serta kondisi hidrologis memicu terjadinya bencana alam lainnya, seperti angin puting beliung, hujan ekstrim, banjir, tanah longsor, dan kekeringan.⁴⁶

Menghadapi ancaman tersebut, pemerintah Indonesia berperan penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana di tanah air. Pembentukan lembaga merupakan salah satu bagian dari sistem yang telah berproses dari waktu ke waktu. Lembaga ini telah hadir sejak kemerdekaan dideklarasikan pada tahun 1945 dan perkembangan lembaga penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat terbagi berdasarkan periode waktu sebagai berikut.

1. Pada Tahun 1945-1966

⁴⁶ <https://bnpd.go.id/home> sejarah badan penanggulangan bencana daerah. Di akses tanggal 1 Desember



Pemerintah Indonesia Membentuk Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). Badan yang didirikan pada 20 Agustus 1945 ini berfokus pada kondisisituasi peranf pasca kemerdekaan Indonesia.Badan ini bertugas untuk menolonga para korban perang dan keluarga korban semasa perang kemerdekaan.

2. Pada Tahun 1966-1967

Pemerintah Membentuk Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam Pusat (BP2BAP) melalui Keputusan Presiden Nomor 256 Tahun 1966.Penanggung jawab untuk lembaga ini adalah menteri sosial.Aktivitas BP2BAP berperan pada penaggulangan tanggap darurat dan bantuan korban becana.Melalui keputusan ini, paradigma penaggulangan bencana berkembang tidak hanya berfokus pada bencana yang disebabkan manusia tetapi juga bencana alam.

3. Pada Tahun 1979-1990

Frekuensi kejadian bencana alam terus meningkat.Penanganan bencana secara serius dan terkoordinasi sangat dibutuhkan.Olek karena itu, pada tahun tahun 1967presiden mengeluarkan keputusan nomor 14/U/KEP/I/1967 yang bertujuan untuk membentuk Tim Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (TKP2BA).

4. Pada Tahun 1979-1990

Pada perioden ini Tim Koordinasi Nasional Penaggulangan Bencana Alam (TKP2BA) ditingkatkan menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (bakornas PBA) yang diketuai oleh Menkokesra dan dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1979. Aktivitas manajemen bencana mencakup pada tahap pencegahan, penanganan darurat, dan rehabilitas. Sebagai penjabaran operasional dari keputusan Presiden tersebut, Menteri Dalam Negeri Dengan Intruksi Nomor 27 Tahun 1979 membentuk Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam (satkorlak PBA) untuk setiap provinsi.⁴⁷

5. Pada Tahun 1990-2000

Bencana tidak disebabkan karena alam tetapi juga non alam serta sosial. Bencana non alam seperti kecelakaan transportasi, kegagalan teknologi, dan konflik sosial mewarnai pemikiran penanggulangan bencana pada periode ini. Hal ini tersebut yang melatarbelakangi penyempurnaan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (bakornas PB). Melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1990, lingkup tugas dari bakornas PB diperluas dan tidak hanya berfokus pada bencana alam tetapi juga non alam dan sosial. Hal ini ditegaskan kembali dengan Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1999. Penanggulangan bencana memerlukan penanganan lintas sektor, lintas pelaku, dan lintas disiplin yang terkoordinasi.

6. Pada Tahun 2000-2005

Indonesia mengalami krisis multidimensi senelum periode ini. Bencana sosial yang terjadi di beberapa tempat keudian memunculkan masalah baru. Permasalah tersebut membutuhkan penanganan khusus Karena terkait dengan pengungsian. Oleh karena itu, bakornas PB kemudian

⁴⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1979



dikembangkan Menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (barkonas PBP). Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 yang kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001.

7. Pada Tahun 2005-2008

Tragedi gempa bumi dan tsunami yang melanda aceh dan sekitarnya pada tahun 2004 telah mendorong perhatian serius pemerintah Indonesia dan dunia internasional dan dunia internasional dalam manajemen penanggulangan bencana. Menindak lanjut situasi saat itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang badan koordinasi nasional penanganan bencana (bakornas PP). Badan ini memiliki fungsi koordinasi yang didukung oleh pelaksana harian sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana. Sejalan dengan itu, pendekatan paradigma pengurangan resiko bencana menjadi perhatian utama.

8. Pada Tahun 2008

Dalam merespon sistem penanggulangan saat ini, pemerintah Indonesia sangat serius membangun legalisasi, lembaga, maupun budgeting. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Kemudian Mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).⁴⁸ BNPB dan BPBD memiliki fungsi pengkoordinasi

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah



pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

B. Sejarah Singkat BPBD Kabupaten Batang Hari

Kabupaten Batanghari terletak di bagian tengah Provinsi Jambi, secara geografis terletak pada posisi 1 derajat 15' Lintang selatan sampai dengan 2 derajat 2' lintang selatan dan diantara 102 derajat 30' bujur timur sampai dengan 104 derajat 30' bujur timur. kabupaten batanghari disebela utara berbatasan dengan kabupaten tebo , kabupaten muaro jambi dan kabupaten tanjung jabung barat , sebelah selatan berbatasan dengan provinsi sumatera selatan , kabupaten Batang Hari dan kabupaten muaro jambi dan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten tebo serta sebelah timur berbatasan dengan kabupaten muaro jambi.

Sebagian besar wilayah kabupaten batang hari berada pada daerah aliran sungai (DAS) sungai batangari dengan rawa-rawa yang sepanjang tahun tergenang air. kecamatan yang terletak didaerah hulu sungai batanghari cenderung lebih bergelombang dibandingkan daerah hhilirnya. daerah bergelombang terdapat di kecamtan maro sebo ulu , kecamatan batin XXIV , kecamatan mersam dan kecamatan maro sebo ilir. kecamatan muaro tembesi, kecamatan muaro bulian kecamatan bajubang dan kecamatan pelayung memiliki topografi yang cenderung lebih datar/ landai.

Kabupaten batanghari terletak dibagian tengah Provinsi Jambi dengan Luas wilayah 5.180,35 Km2. Kabupaten ini mempunyai letak yang strategis karena merupakan lalu lintas yang menghubungkan kawasan barat sumatera.secara geologi, wilaya pantai barat sumatera berada pada batas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pertemuan antara dua lempeng aktif yaitu lempeng Eurasia dan Lempeng Indo-Australia yang sama-sama bergerak dan berintegrasi secara konvergen. hal ini diperkirakan merupakan penyebab terjadinya perlipatan dan patahan pada kulit bumi, pengangkatan daerah daratan menjadi pegunungan (seperti pembentukan penunggunan bukit barisan yang memanjang disumatera) dan Pembentukan Gunung Api seperti Gunung sinabung, sibayak, pusuk buit, sibual-buali, sorik merapi yang merupakan bagian dari proses internal dalam bumi, sedangkan proses eksternal berupa hujan, angin serta fenomena iklim lainnya cenderung melakukan 'perusakan' morfologi melalui proses pelapukan batuan, erosi dan abrasi, dan sebagainya.

Dampak dari interaksi lempeng tersebut mengkondisikan sumber-sumber gempa pada tiga kawasan, yaitu pada jalur subduksi *megathrust*, jalur sesar aktif sumatera (segmen renun, toru dan angkola) dan pada jalur busung belakang sumatera dipantai timur. hal tersebut diperkirakan menjadi pemicu utama terjadinya gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan gerakan tanah longsor.

Untuk mengantisipasi dan mengurangi resiko bencana maka pemerintah kabupaten batang hari sesuai amanat UU **nomor 24 tahun 2007** mengeluarkan **Perda nomor 13 tahun 2011** tentang organisasi dan tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari.

BPBD Batang Hari terarah pada peraturan peraturan Kepala Badan Nasional Bencana, diantaranya :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Standarisasi Data Kebencanaan
3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Lingkungan badan Nasional Penanggulangan Bencana
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pentunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik dilingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Atas Beban Anggaran Belanja Negara dilingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 22 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pemilihan dan Kriteria Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Dari Masyarakat Profesional Pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum dilingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/ Madrasah Aman dari Bencana
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 tahun 2014 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).⁴⁹

C. Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

b. Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi atau organisasi harus dibawa. Visi merupakan suatu gambaran dan harapan yang mendatang tentang keadaan masa depan berisi cita-cita yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi atau pandangan jauh kedepan, kemana dan bagai mana suatu organisasi akan dibawa dan berkarya agar tetap produktif dan inovatif “Waspada Dan Tanggap Terhadap Bencana”

c. Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas badan penanggulangan bencana daerah telah menetapkan misi sebagai berikut:

⁴⁹ Dokumentasi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari



1. Meningkatkan Pemahaman dan Perlindungan Masyarakat Dari Ancaman Bencana
2. Membangun Sistem Penanggulangan Bencana
3. Peningkatan Informasi dan Komunikasi Yang Akurat Sesuai Dengan Kondisi Lapangan.
4. Peningkatan Pemantauan Pengendalian dan Pengorganisasian Terhadap Bencana
5. Terintegrasinya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kawasan Bencana Secara Menyeluruh.⁵⁰

D. Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Tugas pokok
 - a. Pencegahan
 - b. Kesiapsiagaan
 - c. Tanggap Darurat
 - d. Pasca Bencana
 - e. Rehabilitasi
 - f. Rekonstruksi
 - g. Hubungan Antar Lembaga

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Dan Penetapan Kebijakan Penanggulangan Bencana

⁵⁰ Dokumentasi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari



- b. Penanganan Pengungsi, Cepat, Tepat, Efektif Dan Efesiens
- c. Perencanaan Yang Terpadu.
- d. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana
- e. Pemantauan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- f. Pelaksanaan Dan Pelayanan Administrasi.

E. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pada umumnya susunan organisasi adalah suatu gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu dengan cara menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu dengan lainnya.

Susunan organisasi BPBD Kabupaten Batang Hari ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 13 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari dan Peraturan Bupati Batang Hari No 74 Tahun 2011 tentang uraian tugas dan fungsi kepala badan, kepala pelaksana, sekretaris, kepala seksi, dan kelompok jabatan fungsional, pada badan penanggulangan bencana daerah kabupaten.⁵¹

Adapun susunan organisasi pada BPBD Kabupaten Batang Hari sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut diatas adalah sebagai berikut:

⁵¹ Dokumentasi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2022





1. Kepala Tugasnya:
 - a. Memimpin BPBD dan menjalankan tugas dan fungsi BPBD.
2. Unsur pengarahan

Unsur pengarahan terdiri dari unsur pejabat pemerintah daerah terkait serta anggota masyarakat profesional dan ahli dan unsur pengarah berada dibawah dan tanggung jawab kepada BPBD dan unsur pengarahan mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

Adapun fungsi terdiri dari:

- a. Perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana
 - b. Pemantauan
 - c. Pelaksana evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.⁵²
3. Unsur pelaksana yang dipimpin oleh kepala pelaksana Unsur pelaksana dipimpin oleh seorang kepala pelaksana yang membantu kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPBD dalam menjalankan tugas kepala BPBD sehari-hari, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada BPBD dan unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, serta tangap darurat, dan paskabencana secara terintegrasi.

Adapun fungsinya terdiri dari:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana

⁵² Dokumentasi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2022

- b. Pelaksanaan fungsi koordinasi, pengkomandoan dan pelaksanaan bidang penanggulangan bencana
- c. Pembinaan, fasilitas dan pelaksana tugas bidang pencegah dan kesiapsiagaan, penangana darurat, rehabilitas dan rekontruksi, logistik dan peralatan lingkup kabupaten
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- e. Pengelolaan administerasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BPBD
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya Unsur pelaksana yang dipimpin oleh kepala pelaksana membawahi 5 bidang yaitu:

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah tanggung jawab kepala pelaksana BPBD dan secretariat mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, kerumahtangga, humasan, keprotokolan, penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan, monitoring, evaluasi dan laporan.

Adapun fungsi terdiri dari:

- a. Melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan
- b. Melakukan pengelolaan urusan pegawai
- c. Melakukan pengelolaan urusan keuangan
- d. Melakukan pengelolaan urusan perlengkapan
- e. Melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dan keprotokolan



- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan publikasi dan penyebaran informs
- g. Menyusun rencana dan program kerja tahunan
- h. Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian program kegiatan
- i. Mengumpulkan dan menganalisis data pelaksana program kegiatan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pencegah Dan Kesiap Siagaan

Seksi pencegah dan kesiap siagaan mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan bidang pencegahan, mitigasi, dan siap siagaan pada prabencana serta memperdayaan masyarakat.

Adapun fungsi terdiri:

- a. Merumuskan kebijakan dan strategi pencegahan, peringatan diri, mitigasi dan kesiap siagaan penanggulangan bencana, pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- b. Menyusun rencana program kerja tahunan
- c. Menyipakan bahan pelaksanaan koordinasi pencegah bencana, peringatan dini dan mitigsi bencana
- d. Mengidenfikasikan, menganalisis potensi dan menetapkan lokasi bencana
- e. Menyipakan bahan kajian tentang kerentanan masyarakat
- f. Menyiapkan bahan kerja dan analisis kemungkinan dampak bencana
- g. Menyiap bahan kajian pengurusan resiko bencana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- h. Menyiapkan bahan koordinasi penyuluhan dan pelatihan mekanisme tanggapan darurat bencana
- i. Menyiapkan bahan penyusunan prosedur tetap tanggap darurat bencana
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.⁵³

3. Seksi Kedaruratan Dan Logistik

Seksi kedaruratan dan logistik mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Adapun pungsinya:

- a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan
- b. Menyiapkan bahan kebijakan bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, dukungan logistik dan penanganan pengungsi
- c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan bidang menyiapkan bahan pengomadoan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat
- d. Menyiapkan bahan pengomadoan pelaksanaan penanggulangan bencana dengan logistik
- e. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana dan dukungan logistik

⁵³ Dokumentasi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2022



- f. Menyusun bahan kajian dan identifikasi secara cepat dan tepat terhadap penanggulangan bencana dan sumberdaya
- g. Menyusun bahan penetapan status keadaan darurat
- h. Menyusun bahan pelaksana pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberian perlindungan pada kelompok rentan
- i. Melaksanakan koordinasi penyelamatan dan evaluasi masyarakat terkena bencana
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.⁵⁴

4. Seksi rehabilitas dan rekontruksi

Seksi rehabilitas dan rekontruksi mempunyai tugas membantu kepala pelaksanaan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan yang meliputi penyusunan, pelaksanaan pengkoordinasian program dan strategi penanggulangan bencana pada tahapan paska bencana.

Adapun fungsinya terdiri dari:

- a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan
- b. Melaksanakan koordinasi kegiatan rehabilitas rekontruksi paskabencana
- c. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan perbaikan lingkungan daerah bencana dan perbaikan sarana dan prasarana umum

⁵⁴ Dokumentasi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2022



- d. Melaksanakan koordinasi kegiatan pelayanan kesehatan
- e. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi budaya dan pemulihan keamanan dan ketertiban
- f. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemulihan fungsi pemerintah dan pelayanan public
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepala untuk bahan perumusan kebijakan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atas sesuai dengan bidang tugasnya.⁵⁵

5. Kelompok jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.

F. Program BPDB

Untuk melakukan tugas sebagai mana dimaksud dalam pasal 16 Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam usaha penanggulangan bencana, tercermin pada program-program pokok pencegahan dan kesiapan siaga, kedaruratan dan logistik serta pemulihan paska bencana, serta penerapan paradigma baru didalam usaha penanggulangan bencana melalui manajemen Pengurangan Resiko Bencana dengan mengatur, mengendalikan dan memanfaatkan potensi lokal oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah: a.

⁵⁵ Dokumentasi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2022



Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisiensi.

b. Pengkoordinasian pelaksana kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah tanggung jawab kepala pelaksana BPBD dan sekretariat mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, keuangan petlengkapan, kerumah tanggaan, humasan, keprotokolan, penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan, monitoring evaluasi dan laporan.

2. Program pencegahan dan kesiap siagaan

Melakukan pembinaan dan penataan penyusunan pembinaan dan penataan sisten data base kebencanaan, menyipakan peta daerah rawan bencana yang akurat dan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang lokasi yang rawan terhadap resiko bencana. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah para perencana untuk membuta ulusan program pencegahan dan mitigasi bencana, mengupayakan target sasaran 100% melalui implementasi pelaksanaan program pencegahan dan kesipa siagaan yang akan dilaksanakan antara lain:

a. Penyusunan Protap Penanggulangan Bencana

Dimaksud untuk menyiapkan prosedur tetap dan panduan yang menjadi acuan didalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana



didalam wilayah kabupaten Batang Hari. Dengan adanya aturan ini maka proses penanggulangan bencana oleh unit terkait akan lebih sinergi dan terarah, sehingga efektivitas dan efisiensi akan lebih baik.

b. Program Penyiapan Peta Rawan Bencana

Tujuan penyiapan Peta Rawan Bencana adalah untuk mengidentifikasi seluruh wilayah kabupaten batang hari terhadap potensi terjadinya bencana agar dapat dilakukan antisipasi dan mitigasi bencana

c. Program penyiapan prosedur tetap (Protap)

Program ini menyiapkan serangkaian aturan dan prosedur yang akan menjadi dasar bertindak didalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana. Protap yang diharapkan dapat dibuat antara lain Protap Kerja Tim Reaksi Cepat, Komando, prosedur pemberian bantuan tanggap darurat bencana, protap Pusat Komando Pengendalian Lapangan (Pusdalops), protap rehabilitas dan rekontruksi paska bencana, protap pemberian.

d. Program diklat dan simulasi penanganan bencana

Untuk penanganan bencana diperlukan keahlian, keterampilan dan pengetahuan yang cukup serta pengenalan dengan macam dan jenis bencana serta cara penanganannya. Untuk itu diupayakan pendidikan dan pelatihan tentang kebencanaan mulai dari tahapan prabencana, tanggap darurat sampai pada pemulihan keadaan dengan program rehabilitas dan rekontruksi. Kegiatan simulasi bencana juga diharapkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dapat dilaksanakan dengan tujuan membangun kesiapsiagaan tim penanggulangan bencana, masyarakat, dan para stakeholder agar mengenal dan memahami prosedur penanggulangan bencana, penyelamatan diri, keluarga, harta benda sampai pada tahap penanganan pengungsi dan penyaluran logistik darurat dan penanganan medis.

3. Program Sektor Tangap Darurat dan Logistik

a. Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana

Meliputi program pemberian bantuan darurat sandang pangan, seperti makanan, minuman, pakaian, peralatan dapur, mandi, tempat berteduh dan pelayanan kesehatan. Termasuk peyediaan sarana dan prasarana darurat untuk kelancaran aktivitas penanggulangan bencana saat keadaan darurat, seperti pembuatan jalan akses, pengamanan lokasi bencana dari bahaya susulan.

b. Program Penyediaan Peralatan Dan Logistik Bencana

Berupa program untuk menyiapkan peralatan penanggulangan bencana bagi staf BPBD, Tim Reaksi Cepat, Tim Pusdalops, Posko Siaga Bencana, seperti kendaraan operasional, alat komunikasi, pakaian dan tanda pengenalan, peralatan pertolongan darurat, jaket pelampung, perahu karet, tenda komando, peralatan dapur, obat-obatan dan lain-lainya

c. Penyediaan sarana air bersih

Program penyediaan sarana air bersih baik berupa pembangunan instalansi pengelola Air (IPA) dan jaringan pipa air minum, pemasangan sambungan rumah, pembuatan bak air dan lain-lainya, dilaksanakan pada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

daerah-daerah atau desa/kota yang belum menikmati/tersentuh dengan program penyediaan sarana air bersih.

- d. Program Penataan dan Revitalisasi Bangunan Gedung, Niaga dan Pasar serta pembangunan Fasilitas Umum (Fasum) dan olahraga.

Meliputi program penataan dan revitalisasi gedung niaga, pasar agar tercipta iklim yang kondusif dan aman bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi sehingga mampu meningkatkan perputaran ekonomi daerah, serta penyediaan sarana dan prasarana umum bagi masyarakat seperti pembangunan stadion mini, taman bermain, terminal, kawasan miniature Batang Hari sebagai wadah masyarakat dalam beraktifitas dan menjalankan kegiatan sosial kemasyarakatan.

4. Program Sektor Pengembangan Sumberdaya Air (PSDA)
a. Perbaikan Rehabilitas Irigasi Desa

Program perbaikan rehabilitas pada bangunan-bangunan pengairan seperti perbaikan saluran irigasi (Primer, sekunder, tersier), perbaikan pintu-pintu pengambilan air (Intake), atau pintu-pintu pembagi.

- b. Pembangunan Irigasi Sederhana di pedesaan

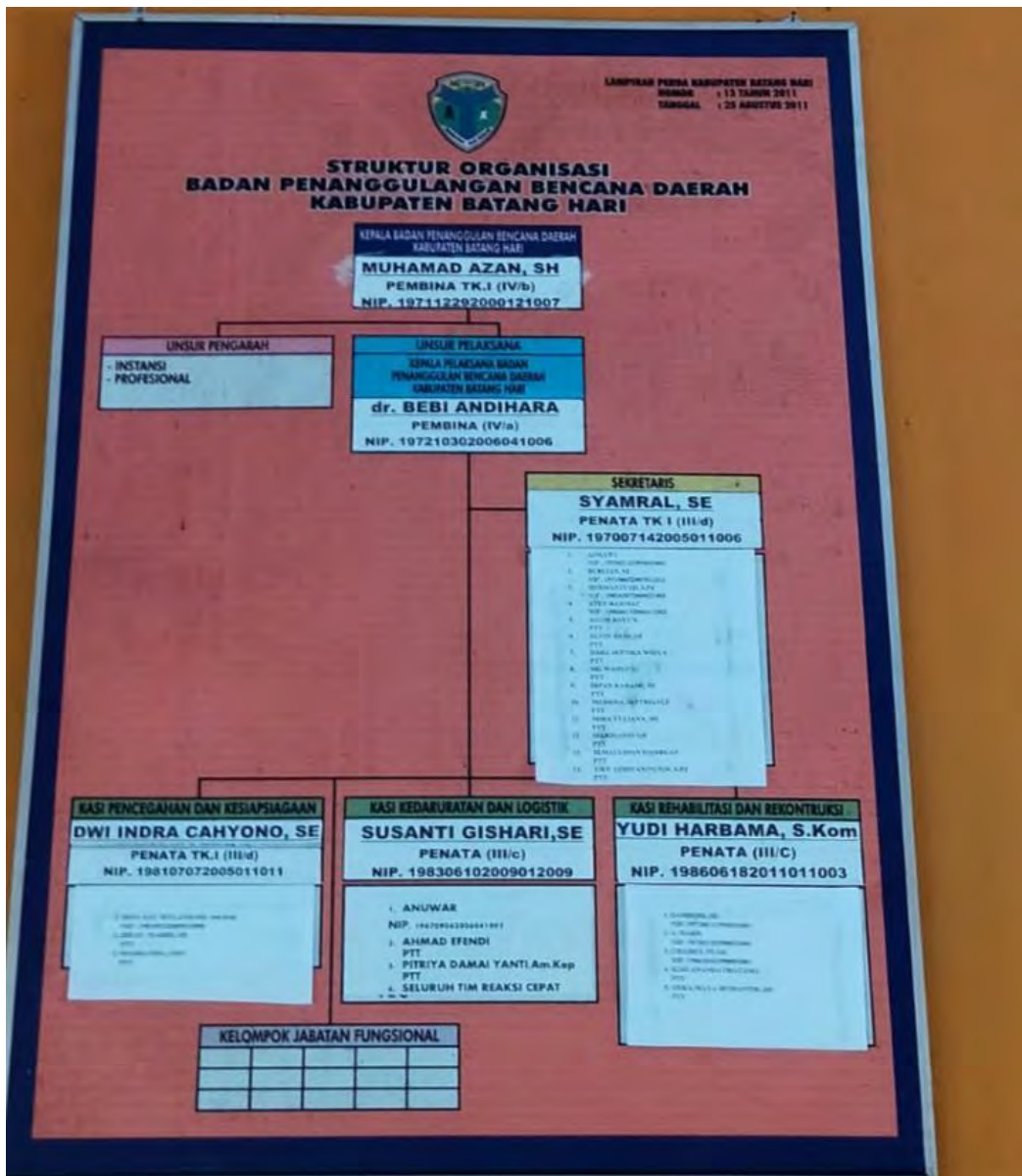
Pembangunan sarana irigasi sederhana pada daerah-daerah/desa yang mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi daerah persawahan atau daerah/desa yang belum mempunyai jaringan irigasi sementara lahan persawahan tersedia untuk digarap.⁵⁶

⁵⁶ Dokumentasi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2022



Gambar.3.1

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang akan diuraikan dalam bab ini dengan menyajikan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para narasumber, sehingga dalam penelitian ini diperoleh gambaran yang jelas, kemudian data tersebut dianalisis dengan teknik analisis kualitatif pada sub bab pembahasan sehingga dapat diperoleh kesimpulan dari hasil penelitian ini.

A. Kebijakan BPBD Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kecamatan Maro Sebo Ilir

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksana suatu pekerjaan, dan cara bertindak. Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari, dimana Kecamatan Maro sebo ilir ini merupakan daerah rendah dan berdekatan dengan sungai batang hari sehigga rawan terjadinya banjir.

Desa yang rawan terjadinya banjir di Kecamatan Maro Sebo ilir salah satunya adalah Desa Danau Embat.⁵⁷ BPBD Kabupaten Batang Hari harus tanggap dan bijak dalam menangani masyarakat yang terkena bencana banjir tersebut dan memberi bantuan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat kembali hidup tentram. Karena dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kecamatan Maro Sebo Iilir

⁵⁷ Dokumentasi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2022

Kabupaten Batang Hari sangat perlu kebijakan dalam menanggulangi bencana banjir tersebut.

Dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Maro Sebo Iilir Kabupaten Batang Hari diperlukan adanya sosialisasi tentang bencana banjir, karena sosialisasi tentang bencana ini termasuk salah satu program kerja BPBD Kabupaten Batang Hari, namun dalam hal ini masyarakat kurang antusias jika adanya sosialisasi yang diberikan, mereka menganggap, masyarakat lebih menanggapi jika diberikan bantuan langsung.

Sebagai mana dalam Pasal 50 Ayat (2), Pasal 58 Ayat (2), Dan Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Perlu Menetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana⁵⁸ dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.⁵⁹

Kebijakan badan penanggulangan bencana daerah dalam menanggulangi bencana banjir di kecamatan maro sebo ilir kabupaten batang hari yaitu:

- a. Penanggulangan bencana
- b. Pelaksanaan kaji cepat
- c. Penetapan status tanggap darurat bencana

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Peraturan Penanggulangan Bencana Daerah

⁵⁹ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan bencana Nomor 1 Tahun 2008



- d. Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk tangap darurat bencana
- e. Distribusi bantuan logistik saat tangap darurat bencana.
- f. Pelaksana rehabilitas paska bencana.⁶⁰
 - 1) Menginventasi jumlah korban harta, benda maupun nyawa beserta fasillitas-fasilitas umum.
 - 2) Melakukan rehabilitas dan rekontruksi secara terkoordinasi dilapangan.
 - 3) Menyampaikan rencana dan program penanganan secara terpada kepada instansi terkait.
 - 4) Memulihkan perekonomian masyarakat di lokasi bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap paska bencana yaitu:

1. Rehabilitasi sebagaimana dilakukan melalui kegiatan
 - 1) Perbaikan lingkungan daerah bencana.
 - 2) Perbaikan prasarana dan sarana umum.
 - 3) Pemberian bantuan perbakan rumah masyarakat.
 - 4) Pemulihan sosial psikologis.
 - 5) Pelayanan kesehatan.
 - 6) Rekonsiliasi dan resolusi konflik.
 - 7) Pemulihan sosial.
 - 8) Pemulihan keamanan.
 - 9) Pemulihan fungsi pemerintahan

⁶⁰ Wawancara Dengan Bapak Muhamad Azan Kepala BPBD Kabupaten Batang Hari, Pada Tanggal 21 November 2022



10) Pemulihan fungsi pelayanan publik.

Rekontruksi sebagai mana dimaksud dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih bai

Setiap proses rehabilitas dan rekontruksi bencana, telah diatur di dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman Rehabilitas Dan Rekontruksi. Dalam peraturan itu kegiatan rekontruksi fisik mencakup, tapi tidak terbatas pada kegiatan membangun kembali sarana dan prasarana fisik melainkan mencakup hal-hal berikut:

- a) Pembangunan kembali prasarana dan sarana.
- b) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat.
- c) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat.
- d) Penerapan rancangan bangunan yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik.
- e) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.
- f) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya
- g) Peningkatan fungsi pelayanan publik.
- h) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.⁶¹

Wawancara dengan Bapak Yudi Harbama Kepala Seksi Rehabilitas Dan Rekontruksi:

“Dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Maro Sebo Ilir, BPBD melaksanakan penanggulangan bencana baik pada saat tanggap darurat maupun paska bencana di daerah bencana artinya BPBD siap siaga dan bijak dalam melaksanakan penanggulangan bencana tersebut dan BPBD melakukan sosialisasi

⁶¹ <http://www.bpkp.go.id/public/uplod/unit/sulut/files/sop%20bencana.pdf> diakses Pada Tanggal 20 Desember 2022



di desa-desa siaga bencana, guna memberikan bekal kepada masyarakat untukantisipasi jika terjadi bencana, memberi bantuan kepada korban bencana banjir dan mendata daerah rawan bencana, mendata korban bencana, mendata kerugian yang di akibatkan bencana banjir, melakukan rehabilitas perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik”⁶²

Dari wawancara diatas bahwa BPBD Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari selaku yang bertanggung jawab dalam hal kebijakan melaksanakan penanggulangan bencana baik pada saat tanggap darurat maupun paska bencana di daerah bencana, penanggulangan bencana melakukan tugas dengan baik, siap siaga dan bijak dalam melaksanakan penanggulangan bencana tersebut dan BPBD melakukan sosialisasi di desa-desa siaga bencana, guna memberikan bekal kepada masyarakat untukantisipasi jika terjadi bencana.

Memberi bantuan kepada korban bencana banjir dan mendata daerah rawan bencana, mendata korban bencana, mendata kerugian yang di akibatkan bencana banjir, melakukan rehabilitas perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan public BPBD juga melakukan rehabilitas dan pendataan kerusakan yang diakibatkan banjir dan masyarakat ikut serta dalam pemulihan aspek layanan yang mana tidak bisa berjalan di akibatkan oleh banjir tersebut dapat berjalan kembali.

Hal ini juga di ungkapkan oleh Bapak Dwi Indra Cahyono Kepala Seksi Pencegahan Dan Kesiapasiagaan :

“Bencana banjir di kecamatan maro sebo ilir kabupaten batang hari hampir beberapa tahun belakangan ini sering terjadi, untuk tahun 2020 banjir di kabupaten batang hari ini merupakan banjir terbesar karena luapan dari air sungai batanghari. Banjir ini disebabkan intensitas curah hujan yang cukup tinggi, terutama di hulu sungai, sehingga debit air meningkat dan meluap ke permukiman warga, namun untuk mengatasi upaya yang dihadapi BPBD Kabupaten Batang Hari memberi bantuan kepada masyarakat dalam bidang bantuan sosial. Bantuan yang dilakukan BPBD adalah dengan membuka dapur umum, tujuan dari adanya dapur umum ini

⁶² Wawancara Dengan Bapak Yudi Harbama, Kepala Seksi Rehabilitas Dan Rekontruksi Pada Tanggal 21 November 2022



yaitu apa bila tidak memungkinkan bantuan mentah untuk korban bencana banjir penyelenggaraan dapur umum untuk melayani kebutuhan makanan para korban bencana banjir, membuka kampung siaga bencana dan memberikan sosialisasi tentang kebencanaan, memberikan bantuan berupa makanan, mendirikan tenda di dataran tinggi untunk pengungsi korban bencana banjir”⁶³

Dari wawancara diatas dapat dipahami bahwa BPBD sangat antisipasi, tanggap, siap siaga memberi bantuan kepada masyarakat dalam bidang bantuan sosial. Bantuan yang dilakukan BPBD adalah dengan membuka dapur umum. Tujuan dari adanya dapur umum ini yaitu apa bila tidak memungkinkan bantuan mentah untuk korban bencana banjir penyelenggaraan dapur umum untuk melayani kebutuhan makanan para korban bencana banjir, membuka kampung siaga bencana dan memberikan sosialisasi tentang kebencanaan, memberikan bantuan berupa makanan, mendirikan tenda di dataran tinggi untunk pengungsi korban bencana banjir jika terjadi banjir di Kecamatan Maro Sebo ilir Kabupaten Batang Hari.

Tabel. 4.1

DATA BENCANA BANJIR DI KECAMATAN MARO SEBO ILIR⁶⁴

NAMA KECAMATAN	TERENDAM	TIDAK TERENDAM
	NAMA DESA/KELURAHAN	NAMA DESA/KELURAHAN
MARO SEBO ILIR	1. Desa Danau Embat	1. Kelurahan Terusan
	2. Desa Terusan	2. Desa Bulian Jaya
		3. Desa Tidar Kuranji
		4. Desa Kehidupan Baru
		5. Desa Bukit Sari
		6. Desa Karya Mukti
Desa : 7		
Kelurahan : 1		
Total : 8		
Keterangan :		
Jumlah Desa	2 Desa	5 Desa
Jumlah Kelurahan		1 Kelurahan

⁶³ Wawancara Dengan Bapak Dwi Indah Cahyono Seksi Pencegah Dan Kesiapsiagaan Pada Tanggal 21 November 2020

⁶⁴ Dokumentasi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari



Tabel. 4.2

REKAPITULASI KABUPATEN BATANG HARI RAWAN BANJIR⁶⁵

No.	NAMA KECAMATAN	TERENDAM	TIDAK TERENDAM
		NAMA DESA/KELURAHAN	NAMA DESA/KELURAHAN
1	BATIN XXIV	12	5
2	MUARA TEMBESI	9	5
3	MARO SEBO ULU	14	2
4	MERSAM	13	5
5	MARO SEBO ILIR	2	6
6	MUARA BULIAN	17	4
7	PEMAYUNG	19	-
8	BAJUBANG	-	10
Total		86	37
Jumlah Keseluruhan		123 Desa/Kelurahan	

⁶⁵Dokumentasi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Batang Hari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Gambar.4.1

DOKUMENTASI BANJIR DI KECAMATAN MARO SEBO ILIR



Genangan Air Rumah Terendam Banjir Yang Menerjang Kecamatan Maro Sebo Ilir Tahun 2020.



Kebijakan Dan Tanggap Darurat BPBD Dalam Menaggulangi Bencana

Banjir Di Kecamatan Maro Sebo ilir Kabupaten Batang Hari.

DOKUMENTASI RUMAH KORBAN TERKENA BENCANA BANJIR 2020

DOKUMENTASI RUMAH KORBAN TERKENA BENCANA BANJIR 2020

REKAPITULASI
 DAFTAR BANTUAN PAKET SEMBAKO TANGGAP DARURAT
 BENCANA BANJIR TAHUN 2020
 KABUPATEN BATANG HARI
 KECAMATAN MARO SEBO ILIR

NO	DESA/KELURAHAN	DATA		KETERANGAN
		JUMLAH KK	JUMLAH Jiwa	
1	2	3	4	11
1	DANAU EMBAT	339	1.239	
	JUMLAH	339	1.239	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Upaya dan tindakan BPDB dalam mengurangi dampak kerugian banjir yang terjadi di Kecamatan Maro Sebo Ilir

1. Berkoordinasi Dengan Pemerintah Kecamatan Dan Pemerintah Desa

Dalam koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa itu ialah berkaitan dengan ketersediaan tempat pengungsian yang layak bagi para korban, memastikan lokasi bencana, berapa banyak korban yang terdampak, bantuan mendesak yang diperlukan para korban, dan lain-lainya.

Jadi tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam koordinasi antar Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa itu ialah mengimbangkan kegiatan kerja dari satu pihak dengan pihak yang lain dalam mencapai tujuan bersama, kemudian selalu terjalinnya komunikasi, baik dalam satu lingkup pihak maupun dalam satu lingkup yang luas. Hal tersebut dikarenakan agar dari pihak yang satu dengan yang lainnya mengetahui perkembangan informasi dan yang terakhir ialah selalu berpegang pada tujuan akhir agar tidak melenceng dan justru memperburuk keadaan dalam sebuah organisasi.⁶⁶

2. Tindakan Preventif

Dalam hal ini BPBD juga melakukan tindakan yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat Tindakan preventif yang merupakan tindakan yang dilakukan BPBD Kabupaten Batang Hari sebelum terjadinya bencana yakni dengan melakukan pencegahan dan menjauhkan masyarakat dari bahaya bencana. Selain itu tindakan preventif juga mengajak masyarakat untuk

⁶⁶ Dokumentasi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari





mencegah terjadinya bencana serta mengurangi resiko korban jiwa dan harta benda.

Berikut ini pemaparan oleh kepala BPBD kabupaten Batang Hari yaitu

Bapak Muhamad Azan

“Bahwa dalam melakukan penanggulangan bencana bukan hanya saat terjadi bencana namun ada serangkaian upaya yang dilakukan. Ada beberapa usaha yang dilakukan BPBD Kabupaten Batang Hari untuk mencegah dan mengurangi resiko bencana dengan cepat dan tepat seperti melakukan kesiapsiagaan seperti melakukan sosialisasi, pelatihan dan simulasi kemudian kami mengidentifikasi potensi bencana dengan menerjunkan anggota kelokasi dengan melakukan pendekatan dengan warga Kecamatan Maro Sebo Ilir agar warga tersebut bisa membantu”⁶⁷

Dari wawancara tersebut bahwa tindakan preventif ini berupa mengidentifikasi potensi bencana yang nantinya BPBD akan mengambil langkah untuk menjauhkan masyarakat dari resiko bencana agar tidak menimbulkan banyak korban jiwa dan harta benda. Selain itu tindakan preventif juga dengan memberikan kepada masyarakat lewat serangkaian kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan dan simulasi.

Hal tersebut juga dikemukakan oleh sekretariat BPBD Kabupaten Batang Hari yaitu Bapak Syamral sebagai berikut:

“banyak usaha preventif yang dilakukan BPBD dalam usaha menanggulangi bencana, salah satunya yaitu usaha pencegahan. Usaha preventif itu adalah usaha pencegahan untuk tidak terjadi bencana sehingga kami membagi di setiap bidang melakukan usaha preventif yang melibatkan masyarakat salah satunya melakukan sosialisasi, pelatihan kemudian simulasi setiap bidang akan melakukan tugasnya masing-masing”.⁶⁸

Dari wawancara diatas bahwasanya usaha preventif ini bertujuan untuk

⁶⁷ Wawancara Dengan Bapak Muhamad Azan Kepala BPBD Kabupaten Batang Hari, Tanggal 21 November 2022

⁶⁸ Wawancara Dengan Bapak Syamral Sekretariat BPBD Kabupaten Batang Hari, pada 21 November 2022

menghindarkan masyarakat dari bahaya bencana seperti masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai yang sering mengalami banjir maka dilakukan pencegahan agar mereka tidak kembali mengalami bencana banjir tersebut. Usaha preventif ini mengharuskan masyarakat agar mampu menangani masalah bencana, oleh karena itu BPBD membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan di kecamatan atau desa-desa.

Hal ini juga diungkapkan oleh Kepala Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari. Wawancara dengan kepala kator Kecamatan Maro Sebo Ilir Bapak M Amin:

“Banyak usaha preventif yang dilakukan BPBD dalam usaha menanggulangi bencana, salah satunya yaitu usaha pencegahan. Usaha preventif itu adalah usaha pencegah untuk tidak terjadi bencana sehingga kami membagi di setiap bidang melakukan usaha preventif yang melibatkan masyarakat salah satunya melakukan sosialisasi pelatihan kemudian simulasi setiap bidang akan melakukan tugasnya masing-masing”.⁶⁹

Dari pemaparan diatas bahwa selalu ada upaya dan tindakan yang dilakukan BPBD yaitu selalu mencoba berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa setempat dan juga BPBD melakukan tindakan yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu beberapa tindakan preventif.

C. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari

⁶⁹ Wawancara Dengan Bapak Bapak M. Amin Camat Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari, Pada 22 November 2022



1. Penetapan kebijakan

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Adapun kebijakan yang dapat merujuk pada proses pembuatan keputusann-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran dan pemilihannya berdasarkan dampaknya.

Badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Batang Hari dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 13 Tahun 2011 yang berlandaskan dasar hukum. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Permendagri Nomor 46 tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja BPBD, Perda Kabupaten Batang Hari Nomor 13 tahun 2011 tentang pembentukan BPBD Kabupaten Batang Hari. Wawancara dengan kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Batang Hari sebagai berikut:

“Sebagai kepala pelaksana saya tentunya harus tahu lebih dahulu mengenai kebijakan serta prinsip organisasi yang saya pimpin, seperti bagaimana pelayanan kepada masyarakat dengan melihat dan mengetahui kebutuhan masyarakat.”⁷⁰

Dari pernyataan informan diatas dapat diklasifikasi bahwa posisinya sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

⁷⁰ Wawancara dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang hari, Pada 22 November 2022





Kabupaten Batang Hari serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebelum mengambil peran dan bertindak telah sepatutnya mengetahui kekurangan dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya.

Wawancara dengan kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Batang Hari sebagai berikut:

“Pada prinsipnya tujuan utama kita melakukan pelayanan kepada masyarakat, untuk sementara pelayanan yang kita lakukan ketika terjadi bencana terlebih dahulu kita menurunkan personil untuk melihat kondisi seperti apa yang terjadi di lapangan.”⁷¹

Wawancara dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Batang Hari tersebut menjelaskan tentang bagaimana prinsip Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan yaitu mengambil sikap dan tindakan dengan memberikan pelayanan ketika terjadi bencana, pemerintah terlebih dahulu mensurvei lokasi yang terkena dampak bencana banjir untuk mengecek kondisi yang terjadi dilapangan.

Wawancara dengan Kepala Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Batang Hari sebagai berikut: “Masalah Perda, Pemerintah Kabupaten Batang Hari sudah mengeluarkan perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.”⁷²

Dari pernyataan Kepala Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bahwa khusus di daerah Kabupaten Batang Hari sendiri tentang Perda yang mengatur hak dan wewenang serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah ada, sehingga BPBD Kabupaten Batang Hari dalam menjalankan fungsi tata kerjanya sudah

⁷¹ *Ibid*

⁷² Wawancara dengan Kepala Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari, Pada 22 November 2022

efektif. Ini tentunya menunjukkan pemerintah Batang Hari serius dalam mempersiapkan diri dalam hal menangani resiko bencana dengan membuat aturan yang dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat itu sendiri dan tentunya meningkatkan antisipasi bagi pemerintah daerah.

Wawancara dengan staf Dinas Sosial Kabupaten BatangHari sebagai berikut:

“Dengan adanya Perda Nomor 13 Tahun 2011, yang sudah di bentuk oleh pemerintah setempat menjadi acuan kita dalam melaksanakan hak, kewenangan dan fungsi tata kerja organisasi.”⁷³

Dari penjelasan di atas Pemerintah Daerah Kabupaen Batang Hari telah membuat Perda tentang bagaimana hak, kewenangan dan fungsi tata kerja organisasi tersebut. Dengan adanya Perda kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanganan bencana menjadi terarah, karena kita mengingat setiap daerah yang ada di Indonesia berbeda-beda sehingga segala bentuk bencana alam yang terjadi juga dapat berpariatif, ini tentunya membutuhkan penanganan yang khusus seperti di Kabupaten Batang Hari sendiri.

Wawancara dengan Kepala Desa Danau Embat Kecamatan Maro Sebo Ilir sebagai berikut:

“Kemarin pada saat banjir yang terjadi di Desa Danau Embat, langkah yang ditempuh Pemerintah, menyiapkan tempat atau posko tanggap darurat, mendirikan dapur umum, memberikan kebutuhan dasar bagi masyarakat atau korban yang terdampak banjir.”⁷⁴

⁷³ Wawancara dengan Staff Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari, Pada 22 November 2022

⁷⁴ Wawancara Kepala Desa Danau Embat Kecamatan Maro Sebo Ilir, Pada 21 November 2022



Dari penuturan Kepala Desa Danau Embat Kecamatan Batang Hari diatas mengemukakan bahwa kebijakan yang di terapkan Pemerintah di Desa Danau Embat adalah mendirikan posko tanggap darurat, dapur umum dan kebutuhan masyarakatnya, ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam penanganan bencana sangat besar dan serius demi menjaga dan melindungi warganya sehingga langkah penanganan darurat perlu di ambil dalam penanganan bencana.

Wawancara dengan masyarakat yang terdampak bencana banjir di Desa Danau Embat sebagai berikut:

“Didaerah kita sudah banyak terdapat penebangan pohon secara liar seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan masyarakat juga sudah banyak yang membuka lahan untuk bertani sehingga jika terjadi hujan tidak ada lagi tempat resapan ditambah luapan air sungai. Penebangan itu susah ditangani karena terkait oleh masalah perut jadi tidak bisa di hentikan secara paksa karena kasian juga keluarga-keluarga mereka.”⁷⁵

Informan tersebut menjelaskan bahwa di Desa Danau Embat, sudah sedikit daerah resapan air, sehingga potensi kerusakan pohon dan sungai sangat besar yang dapat menyebabkan bencana banjir. Dapat disimpulkan bahwa dibalik kerusakan pohon dan luapan sungai karena eksplotasi manusia, di sisi lain juga terdapat kehidupan bagi sekelompok masyarakat tertentu. Sehingga dalam pengambilan keputusan pemerintah perlu berpikir lebih lanjut untuk menghindari terjadinya penyimpangan sosial.

Wawancara dengan Kepala Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Batang Hari sebagai berikut:

⁷⁵ Wawancara Masyarakat Desa Danau Embat Kecamatan Maro Sebo Iir, Pada 21 November 2022





“Untuk menghindari jatuhnya korban maka kami dari BPBD menghimbau kepada masyarakat agar tidak membangun rumah lagi di pinggir sungai batang hari juga selalu menjaga kebersihan lingkungannya”.⁷⁶

Dari pernyataan Kepala Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatas disimpulkan bahwa Untuk menghindari segala kemungkinan yang akan timbul yang diakibatkan oleh banjir pemerintah selalu menghimbau kepada masyarakat yang ada di Desa untuk selalu waspada.

Wawancara dengan salah satu masyarakat yang tinggal di Kecamatan Maro

Sebo Ilir sebagai berikut:

“Kami disini selalu dibekali pengetahuan dan juga peringatan ketika akan memasuki musim hujan, kami diminta untuk selalu waspada khususnya yang tinggal didekat sungai.”⁷⁷

Dari pernyataan Masyarakat diatas mengungkapkan kebijakan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya kerugian akibat banjir, sehingga dalam mengantisipasi semuanya telah dilakukan sosialisai prabencana. Pemerintah telah melaksanakan fungsi kontrol dan fungsi antisipasi, merupakan salah satu prinsip dari penanggulangan bencana yaitu Legistimasi.

Dari hasil wawancara beberapa informan diatas penulis menyimpulkan bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Batang Hari pada Penetapan kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kecamatan maro sebo ilir Kabupaten Batang Hari sudah berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan terlaksananya seluruh tahapan kegiatan dalam Peraturan Daerah No 13

⁷⁶ Wawancara Kepala Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Pada 22 November 2022

⁷⁷ Wawancara masyarakat kecamatan Maro Sebo Ilir, Pada 21 November 2022

Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

2. Pencegahan Bencana

Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi/menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Ketika terjadi bencana tentunya dibutuhkan penanggulangan, yang dibutuhkan adalah dana untuk penanggulangan bencana, serta dalam mengatasi kesulitan masyarakat.

Wawancara dengan salah satu masyarakat di Kecamatan Maro Sebo Ilir sebagai berikut:

“Saya sangat bersyukur karena kita sudah mengantisipasi meski ketika terjadi bencana alam ada himbauan dari pemerintah setempat, akan tetapi masyarakat sudah tahu apa yang dilakukan dari bekal yang mereka dapatkan sebelumnya.”⁷⁸

Dari penuturan salah satu masyarakat mengungkapkan bahwa masyarakat telah ikut berpartisipasi dengan baik dalam mengantisipasi bencana tanpa menunggu intruksi dari pemerintah ketika terjadi darurat sehingga masyarakat tidak tergesa-gesa karena sudah ada bekal sebelumnya. Sehingga pemerintah dapat dikatakan telah berhasil dalam memberdayakan masyarakat, seperti pencegahan bencana yang meliputi. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan,

⁷⁸ *Ibid*



kerugian dan sumber daya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena banjir.

Wawancara dengan salah satu masyarakat Kecamatan Maro

Sebo Ilir sebagai berikut:

“Upaya penanganan bencana banjir yang dilakukan adalah penguatan tebing dan pemasangan beronjong berupa beton. Kita juga harus membuat perencanaan dulu dan kesiapsiagaan untuk penanganan sementara bila terjadi bencana”⁷⁹

Penuturan diatas memberikan pernyataan bahwa untuk memperbaiki daerah yang terkena banjir, yaitu khusus di daerah sungai. Langkah yang diambil adalah penguatan tebing dan memasang beronjong berupa beton, beronjong merupakan bangunan panjang yang menyerupai pondasi bangunan rumah, akan tetapi beronjong berfungsi sebagai penahan erosi tanah sepanjang tepi sungai. Bahan dari beronjong sendiri adalah pasir, semen, batu sungai, dan kawat sebagai lapisan luar agar pondasi-pondasi ini tidak cepat rusak dan jatuh ke sungai sehingga tidak menimbung sungai.

Wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yang terdampak banjir sebagai berikut:

“Jadi setelah di bangun beronjong dan penguatan tebing, masyarakat mengawasi sendiri yang kemudian mengontrol dan merawat bangunan tersebut agar tetap terjaga dan berfungsi sebagaimana semestinya, masyarakat juga menjaga kebersihan sekitar lingkungannya, tidak membuang sampah yang dapat menghambat aliran sungai, setiap hari Jumat di adakan Jumat Bersih.”⁸⁰

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ Wawancara Tokoh Masyarakat yang terdampak banjir di kecamatan maro sebo ilir, pada 23 November 2022



Penulis menarik kesimpulan dari pernyataan informan tersebut yang menjelaskan tentang tugas masyarakat yang melakukan pemeliharaan agar dapat meminimalisir resiko terjadinya bencana yaitu berfungsi untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, antisipasi yang dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana. Hal tersebut bisa dijadikan sebagai alternatif perencanaan partisipatif penanggulangan bencana kedepannya.

Wawancara dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari sebagai berikut:

“Anggaran yang dikeluarkan dalam pembuatan beronjong, anggarannya di kelola sendiri oleh pemerintah daerah di bidang sekretariat keuangan daerah, disini campur tangan Lurah sekedar mengetahui saja tapi tidak terlibat dalam pembangunan.”⁸¹

Dari pernyataan informan diatas memberikan gambaran terhadap peneliti bahwa bagaimana pengelolaan anggaran dikelola, yaitu dalam tahap pengelolaan dana di kelola sendiri oleh sekretariat daerah bidang keuangan sehingga fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari, adalah pelaksana lapangan saja tidak diberikan wewenang dalam pengelolaan dana. Sehingga dalam hal ini pihak pemerintah mempunyai membagi fungsinya masing-masing. Tentunya dalam pelaksanaan program instansi yang satu dengan yang

⁸¹ Wawancara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari, Pada 22 November 2022



lain fokus pada kewajibannya sehingga dalam program penanggulangan bencana tidak terpecah karena mempunyai jobnya tersendiri.

Wawancara dengan Lurah di Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari sebagai berikut:

“Faktor pendukungnya yaitu sarana dan prasarana cukup memadai untuk menangani masalah banjir sedangkan faktor penghambatnya yaitu karna karena sungai ini dangkal sehingga harus dinormalisasi untuk mengatasi peluapan air disungai Batang Hari.⁸²

Berdasarkan pernyataan informan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam pencegahan bencana cukup memadai sedangkan faktor penghambatnya berada pada sungai yang sudah dangkal sehingga pemerintah daerah harus melakukan penanganan secepat mungkin.

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan sedangkan prasarana adalah sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

Dari hasil wawancara beberapa informan diatas penulis menyimpulkan bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Batang Hari dalam pencegahan bencana dapat dikatakan baik hal ini dibuktikan dengan terlaksananya langkah-langkah untuk memperbaiki Kecamatan Maro Sebo Ilir yang terkena banjir

⁸² Wawancara Lurah Kecamatan Maro Sebo Ilir, Pada 21 November 2022



seperti penguatan tebing dan pemasangan beronjong berupa beton yang berfungsi sebagai penahan erosi tanah sepanjang sungai.

3. Tanggap Darurat

Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, perlindungan, penyelamatan, pengungsian, pemenuhan kebutuhan dasar, harta benda serta pemulihan sarana dan prasarana. Sebagaimana yang di ungkapkan Kepala Bidang BPBD Kabupaten Batang Hari sebagai berikut:

“Setelah di lapangan kami dengan instansi atau dinas yang terkait seperti, Dinsos, PU, Dinkes dan seluruh instansi yang terkait langsung menjalankan tugas masing-masing sesuatu dengan perencanaan, dalam mensuplai logistic berupa sandang pangan dan papan.”⁸³

Dari pernyataan salah satu Kepala Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diatas memberikan keterangan bahwa ketika berada dilokasi pemerintah saling bekerjasama dengan instansi/dinas terkait untuk membantu proses rehabilitasi para korban yang terkena dampak bencana agar mereka langsung diberikan bantuan.

Penulis berpendapat bahwa dalam melaksanakan tugas kemanusiaan memang dibutuhkan kerjasama pemerintah itu sendiri

⁸³ Wawancara Kepala Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten BATANGHARI, Pada 22 November 2022



seperti kerjasama antar instansi/dinas terkait agar semua permasalahan yang ada di masyarakat dapat terselesaikan sesuai harapan.

Wawancara dengan Lurah di Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari sebagai berikut:

“Penanganan sementara bila terjadi bencana banjir itu, kita dilokasi melihat kondisinya seperti apa, sehingga kita dapat menghubungi instansi/dinas yang terkait untuk ikut berpartisipasi dalam penanggulangan bencana tersebut.”⁸⁴

Dari pernyataan Lurah diatas bahwa penanganan bencana sementara perlu dilakukan sehingga anggota bisa mendata dan mengevaluasi kebutuhan yang diperlukan setelah diketahui maka selanjutnya adalah menghubungi instansi atau dinas terkait untuk membantu dalam penanganan korban karna untuk masalah besar seperti banjir tentu tidak bisa dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sendiri sehingga dibutuhkan instansi/dinas yang lain untuk terlibat dan membantu menangani bencana yang ada.

Wawancara dengan masyarakat yang tedampak bencana banjir Kecamatan Maro Sebo Ilir sebagai berikut:

“Saya selaku masyarakat membantu pemerintah tidak banyak hanya berusaha dengan menjalankan program yang pemerintah berikan.”⁸⁵

Hasil wawancara dengan penulis menyimpulkan bahwa masyarakat ikut serta berperan dalam melakukan tanggap darurat

⁸⁴ Wawancara Lurah Kecamatan Maro Sebo Ilir, Pada 22 November 2022

⁸⁵ Wawancara Masyarakat Kecamatan Maro Sebo Ilir, Pada 21 November 2022



bencana banjir, Sebagaimana diketahui bahwa antisipasi bencana banjir dengan melakukan pembuatan tanggul dan penanaman tanaman di area yang rawan bencana yang dapat mencegah bencana banjir masyarakat telah berhasil membantu mengsucceskan salah satu program pemerintah yaitu penghijauan, dan dengan informasi yang diberikan oleh masyarakat secara langsung kepada pihak pemerintah daerah dapat memberikan gambaran kepada pemerintah daerah dan lapisan masyarakat yang terkait dalam mengambil tindakan mengenai cara penanganan bencana secara baik yang terjadi maupun yang belum terjadi.

“Pada saat terjadi banjir masyarakat membantu pemerintah menangani dampak buruk yang di timbulkan, seperti kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban.”

Dari pernyataan di atas bahwa masyarakat telah membantu pemerintah menangani dampak buruk yang timbul akibat bencana banjir kerugian secara material dan non material, selain mengganggu aktifitas masyarakat juga menimbulkan masalah kesehatan , sehingga banjir ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak, baik masyarakat maupun pemerintah karena dampak yang ditimbulkan sangat merugikan para korban.

Dari hasil wawancara beberapa informan diatas penulis menyimpulkan bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Batang Hari pada tahap tanggap darurat bencana banjir di Kecamatan Maro Sebo Ilir sudah berjalan dengan baik. Karena BPBD Kabupaten Batang Hari sudah bertanggung jawab untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mengkoordinasikan personil /pengarahan sumber daya termasuk dalam pemenuhan kebutuhan seperti mengambil, menyiapkan dan mendistribusikan bantuan logistik dan peralatan yang dibutuhkan dalam masa tanggap darurat bencana.

4. Rehabilitasi dan rekonstruksi

Rehabilitasi adalah pemulihan dan perbaikan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Sedangkan rekonstruksi yaitu pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Khusus di Kecamatan Maro Sebo Ilir merupakan daerah aliran sungai jadi sudah tentu penguatan tebing dan pembuatan beronjong sangat diutamakan. Lebih lanjut wawancara dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari sebagai berikut:

“Pemasangan beronjong hanya dilakukan di daerah-daerah yang rawan jika terjadi banjir.”⁸⁶

⁸⁶ Wawancara Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari, Pada 22 November 2022



Penuturan informan diatas mengungkapkan bahwa pembangunan beronjong telah terealisasi dari rencana semula, yaitu pemasangan beronjong disepanjang sungai yang berada sekitar pemukiman warga, akan tetapi tahap pertama pembangunan dilakukan baru di lokasi-lokasi vital. setidaknya masyarakat juga mengerti tentang alasan tersebut yang terkendala dana selanjutnya berkaitan dengan masalah proses perencanaan pemulihan.

Sehubungan dengan masalah pembangunan dan pendanaan wawancara dengan Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari sebagai berikut:

“Rehabilitasi dan rekontruksi belum terpenuhi 100% sampai sekarang, karna itu sungai kalau kita mau tangani sangat membutuhkan dana yang besar.”⁸⁷

Wawancara dengan salah satu staf Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari sebagai berikut:

“Dalam rekontruksi pembangunan beronjong tepi sungai dananya sudah ada disiapkan oleh pemerintah, terkadang ada juga masyarakat ikut berpartisipasi memberikan sumbangan tenaga.”⁸⁸

Dalam penanganan masalah bencana banjir masyarakat dilibatkan dalam pekerjaannya. Hal ini untuk memberdayakan masyarakat dan agar mereka bekerja dan mengetahui sendiri kebutuhan yang penting untuk sejauh mana kebutuhan mereka. Peran masyarakat

⁸⁷ Wawancara Kecamatan Maro Sebo Ilir, Pada 22 November 2022

⁸⁸ Wawancara Staff Dinas Social Kabupaten Batang Hari, Pada 22 November 2022



memang penting untuk dilibatkan agar fungsi kontrolnya dapat berfungsi, sehingga mereka dapat mengawasi sendiri pembangunan daerahnya.

Wawancara dengan salah satu masyarakat sebagai berikut: “Kami bersama warga yang lain membantu membenahi fasilitas yang rusak akibat terjangan banjir, seperti rumah-rumah warga, jalan dan sebagainya sehingga dapat dipergunakan kembali setelah terjadi banjir sehingga tidak butuh waktu lama untuk bangkit kembali.”⁸⁹

Berdasarkan wawancara dengan informan diatas mengungkapkan kerjasama sesama masyarakat membangun fasilitas yang rusak sehingga dapat dipergunakan kembali. Pemulihan darurat dengan operasi tanggap darurat pada aspek pemulihan darurat berupa perbaikan prasarana dan sarana vital seperti: jalan. Hal ini dapat dilakukan sejak sesaat setelah kejadian bencana. Tujuannya adalah untuk mempercepat normalisasi kehidupan sosial ekonomi sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupan sehari-harinya.

Wawancara dengan kepala bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari sebagai berikut:

“Iya kami sangat berterima kasih atas sumbangan tenaga dari masyarakat yang sudah berperan aktif dalam pembangunan dan pencegahan bencana tersebut.”⁹⁰

Dari wawancara dengan informan diatas mengatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas-tugas dilapangan pemerintah dalam hal ini

⁸⁹ Wawancara Masyarakat Kecamatan Maro Sebo Ilir, Pada 21 November 2022

⁹⁰ Wawancara Kepala Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari, Pada 22 November 2022



Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari, membutuhkan keterlibatan masyarakat. Apalagi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di zaman modern sekarang semakin sulit karena nilai kerjasama, gotong royong dan berbagai kearifan lokal makin terkikis.

Dari hasil wawancara beberapa informan diatas penulis menyimpulkan bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Batang Hari sudah baik hal ini dibuktikan dengan terlaksananya kegiatan pemulihan sarana dan prasarana dilakukan dengan dana tanggap darurat dan dana tak terduga dengan tahapan yakni mengkoordinasikan instansi/lembaga untuk pemulihan segera pemulihan prasarana dan sarana vital, membangun dan mengembalikan fungsinya jalan jembatan dan kebutuhan fisik lainnya.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam mencegah penebangan pohon yaitu: (a). Melakukan penyuluhan kepada masyarakat. sangat penting untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat penyuluhan yang membahas tentang bahaya penebangan liar, apabila kesadaran dimasyarakat sudah tumbuh, maka penebangan liar ini bisa dihindari (b). Melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Masyarakat harus diberikan pemahaman untuk perbaikan hutan (c). Perketat pengawasan dan pengendalian. Peran aktif masyarakat juga diperlukan untuk mengatasi penebangan liar (d). Mempertegas peraturan perundangundangan (e). Memberikan sanksi kepada pelaku. Sedangkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yang dilakukan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir yaitu: (a). Membuat dan memprediksi peta rawan banjir (b). Pemeliharaan, perbaikan, dan normalisasi aliran sungai, daerah tampungan air (c). menyarankan masyarakat untuk tidak membangun rumah ditepi sungai (d). pembuatan beronjomg.

Berdasarkan dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi di lapangan, penulis menarik kesimpulan bahwa Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari dapat dikatakan baik. Untuk itu Perlindungan terhadap masyarakat dalam pemulihan bencana sangat dibutuhkan, makanya peran pemerintah sangat dibutuhkan, mengingat pengetahuan masyarakat tentang menjaga kondisi alam agar tetap terjaga keasliannya sangat minim. Serta diperlukan kesadaran dari masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam sehingga sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan programnya, mengingat bahwa pemerintah juga sangat membutuhkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneliti Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana banjir di Kecamatan Muaro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari. Maka dapat diambil kesimpulan: Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menagguli Bencana Banjir di Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari meliputi, pertama pelaksana pemberi bantuan terhadap korban bencana banjir dengan sigap dan cepat, kedua melakukan kesiapsiagaap terhadap bencana, ketiga tanggap darurat apa bila terjadi bencana, ke empat rehabilitas dan rekontruksi setelah tejadinya bencana. Upaya dan tindakan yang diterapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari yaitu berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan tindakan Preventif yang merupakan tindakan yang dilakukan BPBD Kabupaten Batang Hari sebelum terjadinya bencana yakni dengan melakukan pencegahan dan menjauhkan masyarakat dari bahaya bencana. Selain itu tindakan preventif juga mengajak masyarakat untuk mencegah terjadinya bencana serta mengurangi resiko korban jiwa dan harta benda. Adapun peran BPB dalam penanggulangan bencana banjir di kecamatan maro sebo ilir yang pertama diterapkan adalah menetapkan kebijakan, pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekontruksi.



B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis terhadap peneliti selanjutnya adalah yang terjadi dilapangan dan kebijakan serta kendala yang dilakukan oleh BPBD terhadap penanggulangan bencana banjir. Penulis menyadari dalam penelitian ini masih banyak kekurangan-kekurangan baik dari segi teknik penulis dan ketajaman analisis terhadap peristiwa yang terjadi dilapangan yang disebabkan keterbatasan ilmu pengetahuan waktu dan tenaga serta pendanaan maka diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan segala kekurangan dalam penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Anwar Musyadad, 2015.”*Kinerja badan penanggulangan bencana daerah dalam bencana banjir di kabupaten lebak*” (Universitas Sulthan Ageng)
- Budi Wiranto, *Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus)* (Yogyakarta: Caps,2012)
- Hasibuan , Malayu S.P. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah.* Jakarta: Bumi Aksara
- Farichatun Nisa, 2014, (*Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir, Putting Beliung dan Tanah Longsor Di kabupaten Jombang ISSN*), 2338-445X, Vol 2, No 2, Universitas Airlangga
- Henrika, 2021”*peran badan penanggulangan bencana daerah dalam penanggulangan bencana banjir di kelurah lewaja*”(Universitas Muhamadiyah Makasar)
- Husaini Usman, Purnomo. *Metode Penelitian Sosial.* (PT Bumi Aksara:2008).
- Inu Kencana Syafiee, *Ilmu Pemerintahan & Al-Qur'an*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara 2004).
- Inu Kencana Syafe'i, *Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: Mandar Maju,2007)
- Keban, Jeremias T. 2003. *Indikator Kinerja Pemerintah Daerah: Pendekatan Manajemen dan Kebijakan, Makalah Seminar Sehari.* Yogyakarta: FISIPOL UGM
- Kodoatie. J. Dan Sugiyanto. Ri, (2002). *Banjir.* Yogyakarta: PustakaBelajar.
- Ligal, S. (2008). *Pendekatan Pencegahan Dan Penanggulangan Banjir. Jurnal Dinamika Teknik Sipil.*
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mahsun, Muhammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik.* Yogyakarta: FE UGM





- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu 2006. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008)
- Moeheriono. 2010. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nahrul Fhadila, 2020, *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Jambi*, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
- Nurmala Harahap, 2020.” Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Pekanbaru” (Universitas Islam Riau)
- Rina, Marina, 2013, Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Sungai Mandau, Riau, Bina Widya
- Robbins, Stephan P. 2001. *Prilaku Organisasi*. Jakarta: Prehalindo
- Sinambela, Lijan Poltak dkk. 2014. *Reformasi Pelayanan Public Teori Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sedarmayanti. 2004. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Jakarta: CV. Mandar maju
- Simanjuntak, Payaman J. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: CV. Mandar Maju
- Steers, R.M. 2003. *Organization Effectiveness A Behavioral View*. Jakarta: Erlangga
- Soebandi, Baban. 2006. *Desentralisasi dan Tuntunan Penataan Kelembagaan daerah*. Bandung: Humaniora
- Sujardi. 2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: Refika Aditama
- Warto, Agus T Sunit & Nugroho P, Pantyo, 2002, (*Pengkajian Manajemen Penanggulangan Korban Bencana pada masyarakat di Daerah Rawan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Bencana Alam dalam era Otonomi daerah) Yogyakarta : Departemen Sosial RI

Wibowo. 2011. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Wijayanto, D. (2012). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*.(Remaja Rosdakarya;2014



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B-6588 /D.II.1/PP.00.11/10/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 20 Oktober 2022

Kepada Yth.
Kepala Desa Danau Embat
Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : Akbar Safitrah
NIM : 105180286
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **Kebijakan Pemerintah Kabupaten Batanghari dalam Menangani Kasus Bencana Alam Banjir di Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari.**

Lokasi Penelitian : Kantor Desa Danau Embat Kec. Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari
Waktu Penelitian : 20 Oktober 2022 – 20 Januari 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb



An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan

Agus Syim, M.A., M.I.R., Ph.D
NIP. 19580817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Lampiran 2



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B-6588 /D.II.1/PP.00.11/10/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 20 Oktober 2022

Kepada Yth.
Bapak Camat Kecamatan Maro Sebo Ilir
Kabupaten Batanghari
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : Akbar Safitrah
NIM : 105180286
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : Kebijakan Pemerintah Kabupaten Batanghari dalam Menangani Kasus Bencana Alam Banjir di Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari.

Lokasi Penelitian : Kantor Camat Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari
Waktu Penelitian : 20 Oktober 2022 – 20 Januari 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan

Agus Saibon, M.A., M.I.R., Ph.D.
NIP. 196308172009011009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip



Lampiran 3



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B-689 /D.II.1/PP.00.11/10/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 20 Oktober 2022

Kepada Yth.
Kepala BPBD Batanghari
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : Akbar Safitrah
NIM : 105180286
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : Kebijakan Pemerintah Kabupaten Batanghari dalam Menangani Kasus Bencana Alam Banjir di Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari.

Lokasi Penelitian : Kantor BPBD Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari
Waktu Penelitian : 20 Oktober 2022 – 20 Januari 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb

Agus Saifuddin
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan
Agus Saifuddin, M.A., M.I.R., Ph.D
10172009011009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Lampiran 4

Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1	Muhammad Azah	Kepala Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari
2	Syamral	Sekretariat BPBD Kabupaten Batang Hari
3	M. Amin	Camat Maro Sebo Iir Kabupaten Batang Hari
4	Syahrul Riyadi	Staff Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari
5	Abdullah	Kepala Desa Danau Embat Kecamatan Batang Hari
6	Qiyamul Zaki	Masyarakat Desa Danau Embat Kecamatan Maro Sebo Iir
7	Chairullah	Tokoh Masyarakat yang terdampak banjir di kecamatan maro sebo ilir
8	M. Arsyad	Masyarakat Desa Danau Embat Kecamatan Maro Sebo Iir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Lampiran 5

Lembar Wawancara untuk BPDB

4. Bagaimana kebijakan BPBD dalam menanggulangi bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Maro Sebo Ilir?
5. Bagaimana upaya dan tindakan BPBD dalam mengurangi dampak kerugian banjir yang terjadi di Kecamatan Maro Sebo Ilir?
6. Bagaimana Peran BPBD dalam penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Maro Sebo Ilir?
7. Bagaimana tanggapan masyarakat atas Tindakan BPDB?
8. Apa kendala yang dialami BPDB dalam upayanya mengurangi dampak kerugian banjir yang terjadi di Kecamatan Maro Sebo Ilir?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Lampiran 6

Lembar Wawancara untuk masyarakat

1. Apa kebijakan BPBD dalam menanggulangi bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Maro Sebo Ilir sejauh ini?
2. Apa upaya dan tindakan BPBD dalam mengurangi dampak kerugian banjir yang terjadi di Kecamatan Maro Sebo Ilir sejauh ini?
3. Bagaimana Peran BPBD dalam penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Maro Sebo Ilir sejauh ini?
4. Bagaimana tanggapan anda atas Tindakan BPDB?
5. Menurut anda, apa kendala yang dialami BPDB dalam upayanya mengurangi dampak kerugian banjir yang terjadi di Kecamatan Maro Sebo Ilir?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lampiran 7

DOKUMENTASI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DOKUMENTASI RUMAH KORBAN TERKENA BENCANA BANJIR 2020



DOKUMENTASI RUMAH KORBAN TERKENA BENCANA BANJIR 2020



REKAPITULASI DAFTAR BANTUAN PAKET SEMBAKO TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR TAHUN 2020 KABUPATEN BATANG HARI KECAMATAN MARO SEBO ILIR

NO	DESA/KELURAHAN	DATA		KETERANGAN
		JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	
1	2	3	4	11
1	DANAU EMBAT	339	1.239	
	JUMLAH	339	1.239	

CURICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : Akbar Safitrah

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat, Tanggal Lahir : Desa Danau Embat, 18 Januari 1999

NIM : 105180286

Alamat Asal : Desa Danau Embat Kecamatan Maro
Sebo Ilir kabupaten Batang Hari

Nomor Telpon : 082297137599

Nama Ayah : Suhaili

Nama Ibu : Dian Sanadia

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal :
 - a. SD., Tahun Lulus : SD 149 Desa Danau Embat, 2012
 - b. SMP, Tahun Lulus : Pondok Pesantren Darul Ikhwan Desa
Danau Embat, 2015
 - c. SMA, Tahun Lulus : MAN 2 Batang Hari, 2018
 - d. S1 : UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi,
2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

